

# **WARTA PENGAWASAN**

NOMOR 3 TAHUN 2020

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



# **CEPAT & TEPAT**

ISSN 0854-0519



**Majalah Warta Pengawasan** merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

---

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP  
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta  
Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes  
0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
(BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala  
BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal  
26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen  
PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982,  
ISSN 0854-0519, Homepage: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) - Email: [wartapengawasan@gmail.com](mailto:wartapengawasan@gmail.com).  
Dilarang mengutip atau memproduksi  
seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin  
redaksi.

**Majalah Warta Pengawasan** dapat  
di unduh melalui



# EDITOR'S NOTE

*"Economy does not lie in sparing money, but in spending it wisely"*

*- Thomas Henry Huxley*

**P**ermisi, paket! Bagi sebagian orang, panggilan kurir ekspedisi lebih sering terdengar di masa pandemi ini. Selain karena memang lebih nyaman berbelanja secara daring di tengah pembatasan sosial, seruan untuk menggenjot belanja bagi kalangan menengah atas juga banyak digaungkan. Tujuannya, tak lain supaya roda perekonomian terus berputar. Bagi kalangan menengah bawah, pemerintah telah, sedang, dan terus menyalurkan bantuan, baik berupa subsidi tunai maupun bantuan sosial lainnya, untuk menyangga daya beli masyarakat. Meski masih negatif, konsumsi rumah tangga dinilai membaik berdasarkan realisasi *Product Domestic Bruto* (PDB) Semester I 2020. Demikian pemerintah pun bergerak cepat merealisasikan belanjanya di kuartal ketiga ini.

Kebijakan pembatasan sosial tak bisa dipungkiri memang berimbas pada kontraksi tajam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Tak main-main, International Monetary Fund (IMF) mencatat dampaknya bahkan melebihi krisis

keuangan global yang terjadi di tahun 2009 lalu. Disebutkan jumlah transaksi beberapa industri, seperti pariwisata, restoran, hobi, dan toko bangunan mengalami anjlok lebih dari 50%. Tapi di sisi lain, penjualan atas usaha pulsa, kecantikan dan kesehatan, serta logistik meningkat pesat.

Perubahan tren ini kemudian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi, di sektor apapun sudah tak terelakkan. Adopsi teknologi bisa dimulai dari hal kecil, seperti pencatatan keuangan dan operasional pemasaran. Siapa sangka, teknologi pemberian pakan ikan pun bisa menghasilkan efisiensi yang signifikan di bidang akuakultur. Mengenai hal ini, bisa Pembaca simak lebih lanjut di rubrik *Inspiring Person*.

Di luar soal belanja, pandemi ini juga melahirkan kembali semangat gotong royong. Sebut saja Gerakan *Canthelan* dan Sambatan Jogja atau Sonjo yang dibahas di rubrik *Insight*, sebagai aksi solidaritas untuk menghidupkan kembali geliat perekonomian di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun bagi sektor pariwisata, bulan

Juli lalu pemerintah meluncurkan Indonesia *Care* (*I Do Care*) di Lagoi Bintan sebagai kampanye yang menyosialisasikan urgensi penerapan protokol kesehatan berbasis *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) sesuai standar internasional di sembilan destinasi *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE).

Dalam upaya pemulihan ekonomi ini, satu hal yang perlu diingat, risiko Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Angka kasus yang masih meningkat dan pengembangan vaksin yang masih berjalan mewajibkan kita untuk tetap menjalankan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), TLI (Tes, Lacak, dan Isolasi), dan penguatan sistem kesehatan.

Nah, pembaca, sambil menikmati sajian kami di edisi ini tentang upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional dan menjaga akuntabilitasnya, pembaca bisa ikut juga turut memulihkan ekonomi dengan berbelanja secara tepat ya, tepat sesuai kebutuhan dan dibeli di UMKM sekitar pembaca.

Salam Redaksi

## SUSUNAN REDAKSI

**Pelindung:** Kepala BPKP – **Pembina:** Sekretaris Utama – **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP – **Penanggung Jawab:** Eri Satriana – **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santosa, Sally Salamah, Amdy Very Darma, Edi Mulia – **Kontributor Tetap:** Nani Ulina, Fauzi, Setya Nugraha – **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratigno – **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari – **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa – **Pemimpin Administrasi:** Tri Wahyono – **Redaktur Pelaksana:** Nadia Khaerunnisa – **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine – **Reporter:** Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Devina, Tien Saputri Kusuma Aditya – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini – **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin – **Administrasi:** Nursanty Sinaga, R. Hanifah – **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko – **Sirkulasi:** R. Hanifah

# CONTENTS

- 04 THE BRIEF**  
Pulihkan Ekonomi untuk Negeri
- 08 COVER STORY**  
Cepat dan Tepat, Ekonomi Bangkit!
- 14 INFOGRAPHIC**
- 16 INDONESIA THIS QUARTER**
- 20 GOVERNANCE VANTAGE POINT**  
Langkah Sederhana Menuju Daerah Hebat
- 24 CONTROL VANTAGE POINT**  
Bergerak Lincah Mengawal Pemulihan  
Ekonomi Nasional
- 27 INTERNAL CONTROL TALK**
- 31 INSIGHT**  
Gotong Royong Bangkitkan (Kembali)  
Ekonomi Daerah
- 34 ORGANIZATIONAL CULTURE**  
Menjamurnya Komunitas ASN Muda: *Being or  
Becoming*
- 38 PUBLIC POLICY**  
Indonesia Jadi Rujukan Kesuksesan Program  
Inklusi Keuangan





42

### **CERTIFICATION**

Jadi Auditor Berdaya Saing Global dengan CIA

44

### **JFA TALK**

46

### **INSPIRING PERSON**

Mendunia dengan Teknologi Pakan Ikan

50

### **BOOK REVIEW**

Dengarlah Nyanyian Angin oleh Haruki Murakami

52

### **MOVIE REVIEW**

Manusia dan Alien Bisakah Bersinergi?

54

### **THE BEAUTY OF INDONESIA**

Lukisan Indah Serambi Madinah

-

### **ARTIKEL**

02 Pandemi Covid-19 dan Momentum Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

05 Sudah Siap Jadi *Coach*?

09 Menyemai *Agile Mindset*, Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP di Tengah Krisis



Foto  
BPKP KEPRI



# PULIHKAN EKONOMI UNTUK NEGERI

## LINDUNGI RAKYAT DARI PANDEMI

Tahun 2020 hampir selesai terlewati, tetapi cerita yang ada sungguh tak terduga karena pandemi. Tentu sebagian besar pembaca akan mengangguk setuju. Pandemi Covid-19 ini membawa konsekuensi yang luas, baik konsekuensi ancaman kesehatan, maupun dampak ekonomi yang mengikutinya. Terkait ancaman kesehatan, tentu pembaca sudah paham betul kondisinya. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi yang diakibatkannya? Pasar saham global mulai anjlok sejak akhir Februari 2020 karena kenaikan signifikan jumlah kasus Covid-19 di luar Cina daratan. Bahkan, pada 28 Februari 2020, pasar saham di seluruh dunia mengalami penurunan mingguan terbesar sejak krisis keuangan di tahun 2008. Parahnya lagi, penurunan tak berhenti di sana karena setelahnya, pasar saham global mengalami kejatuhan terburuk sejak 1987. Kala itu, pada tanggal 19 Oktober 1987, pasar saham global mendadak anjlok tanpa diduga, atau dikenal dengan istilah *Black Monday*.

Tak berhenti di sana, medio antara April dan Juni 2020, International Labour Organization mencatat bahwa diperkirakan sekitar 400 juta pekerjaan *full-time* hilang di seluruh antero dunia. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa. Merujuk pada data yang dirilis International Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran di hampir seluruh negara di dunia meningkat drastis. Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2019, tingkat penganggurannya 3,7 persen. Di tengah kondisi pandemi ini tingkat pengangguran meroket menjadi 10,4 persen. Pendapatan yang diperoleh pekerja secara global turun 10 persen dalam sembilan bulan pertama tahun 2020, setara dengan kehilangan lebih dari US\$3,5 triliun. Kondisi ini dapat mengakibatkan krisis pangan, lonjakan harga, dan gangguan pasar. Kenaikan harga tersebut akan

sangat dirasakan oleh masyarakat rentan yang menggantungkan hidupnya pada pasar, apalagi bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup.

Pada September 2020 ini, hampir seluruh negara maju sudah berada dalam kondisi resesi atau depresi, sementara negara-negara berkembang berada dalam kondisi resesi. Pemodelan yang dirancang oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa di beberapa negara, diprediksi pemulihan ekonomi secara penuh baru bisa dicapai pada tahun 2025 atau setelahnya. Lalu, apakah arti dari angka-angka dan kondisi tadi? Tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, telah bergerak seiring dalam mekanisme tata kelola dunia, mengumumkan pengembangan



Foto  
BPKP MALUT

dan implementasi program untuk pemulihan ekonomi.



Penting memahami bahwa upaya pemulihan ekonomi atas dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini, ada relasinya dengan upaya penanganan kesehatan masyarakatnya. Di tingkatan dunia, tak hanya di Indonesia, tidak sedikit muncul anggapan bahwa melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi ekonomi, diasumsikan sebagai bentuk *trade-off*, di mana negara harus memilih antara keduanya. Tetapi apakah asumsi ini benar? Lembaga penelitian independen dunia bernama Our World Data telah melaksanakan riset untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut. Dengan sampel 38 negara dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, penelitian tersebut menemukan fakta yang berbeda dari asumsi yang ada. Lembaga riset tersebut justru menemukan bukti bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berkorelasi positif, artinya penanganan

kesehatan yang baik juga dibarengi dengan pemulihan ekonomi yang baik pula, tidak ada *trade-off*.

Pemerintah Indonesia pun melaksanakan upaya cepat dan tepat sejak pandemi merebak di negara kita. Sejak Maret lalu, program pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di tengah masyarakat menjadi fokus utama. Presiden RI Joko Widodo terus-menerus menggarisbawahi bahwa kedua upaya tersebut harus selalu berjalan beriringan karena keduanya sangat penting untuk dilakukan, bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah fokus utamanya. Untuk mengintegrasikan keduanya, Presiden Jokowi kemudian membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang disahkan Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020. Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Indonesia kini berada di bawah koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN. Presiden menekankan bahwa komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Di dalamnya, BPKP ikut berperan dalam percepatan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kementerian dalam konteks penanganan Covid-19 dan PEN tersebut.

(Betrika Oktaresa)



# CEPAT DAN TEPAT, EKONOMI BANGKIT!

Betrika Oktaresa

**P**andemi Covid-19 harus ditangani secara cepat dan tepat. Menyadari hal tersebut, pemerintah sejak awal memfokuskan pada program pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di tengah masyarakat. Presiden RI Joko Widodo terus-menerus menggarisbawahi bahwa kedua upaya tersebut harus selalu berjalan

beriringan, yaitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utamanya. Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, penguatan tes, lacak, dan isolasi yang baik terus ditingkatkan sehingga dapat menurunkan angka tingkat penularannya. Selain itu, pemerintah terus menggiatkan penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada seluruh lapisan

masyarakat. Peningkatan sistem kesehatan juga terus dilakukan pemerintah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, perlindungan terhadap tenaga medis termasuk peningkatan kualitas dan kuantitasnya, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

**Upaya Pemerintah Membangkitkan Ekonomi**  
Lalu, mengapa muncul

dampak ekonomi dari adanya pandemi ini? Salah satu faktor utamanya tentu adanya penurunan mobilitas akibat kebijakan restriksi bagi masyarakat. Hampir di seluruh negara di dunia, restriksi yang terjadi di sekitaran bulan April–Mei 2020 lalu menyebabkan kontraksi yang tajam pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebijakan restriksi seperti yang diambil pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terindikasi efektif dalam menekan penularan Covid-19, tetapi membawa dampak pada perekonomian sehingga perlu adanya penanganan atas dampak tersebut.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, pada tanggal 9 Mei 2020, menegaskan langkah pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Dalam regulasi tersebut, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.

**Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.**

Ruang lingkup yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut antara lain dalam bentuk Penanaman Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang didedikasikan untuk hal tersebut. Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun rupiah atau sekitar 4,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Lalu, untuk apa saja anggaran tersebut? Pemerintah membaginya dalam beberapa kluster, yaitu Kluster Kesehatan dengan alokasi Rp87,55 triliun,

Kluster Perlindungan Sosial dengan alokasi Rp203,90 triliun, Kluster Insentif Usaha dengan alokasi Rp120,61 triliun, Kluster Bantuan UMKM dengan alokasi Rp123,46 triliun, Kluster Pembiayaan Korporasi dengan alokasi Rp53,57 triliun, dan Kluster Pembiayaan Sektoral K/L/D dengan alokasi Rp106,11 triliun.

**Mengawal Keberhasilan Program PEN**

Pembaca pasti masih ingat arahan tegas Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 pada 15 Juni lalu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel. Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. *Output* dan *outcome*-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Arahan Presiden tersebut menggariskan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang perlu dipastikan mengiringi jalannya program penanganan Covid-19

dan pemulihan ekonomi nasional. Akuntabilitas menggambarkan hubungan antara pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu (*accountor*) dengan pihak-pihak yang harus menilai bagaimana *accountor* melaksanakan tanggung jawabnya (*accountee*). Artinya, *accountor* harus mampu menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dinilai oleh *accountee*. Dalam laporan tentang akuntabilitas *Government of United Kingdom* yang disusun oleh *Institute of Government* pada tahun 2018, ditegaskan bahwa akuntabilitas yang kuat di sektor pemerintah dapat dimaknai dengan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan dan

dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden di atas, bahwa akuntabilitas perlu dijaga untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tata kelolanya baik dan *output* dan *outcome*-nya harus bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Guna mengawal akuntabilitas program PEN, dalam PP 23 Tahun 2020 (diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020 pada 4 Agustus 2020), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanatkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program PEN, antara lain mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan APIP, pimpinan K/L/D dan korporasi/badan usaha.

BPKP juga diamanatkan untuk menetapkan pedoman pengawasan intern program PEN. Selain itu, Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan) juga dapat meminta BPKP untuk melaksanakan verifikasi data dan informasi pihak ketiga dalam pelaksanaan program PEN. Atas kegiatan yang dilakukan, BPKP melaporkan hasil pengawasan internnya kepada Presiden RI dan/atau Menteri Keuangan.

Bergerak cepat, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh merilis Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program PEN pada tanggal 29 Juli 2020. Dengan adanya pedoman ini, BPKP dan APIP memiliki acuan umum



dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern Program PEN. Dalam melakukan pengawasan intern, yang meliputi kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*), terbagi dalam empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil pengawasan intern, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

### Akuntabilitas bukan Hambatan, Justru Mengakselerasi

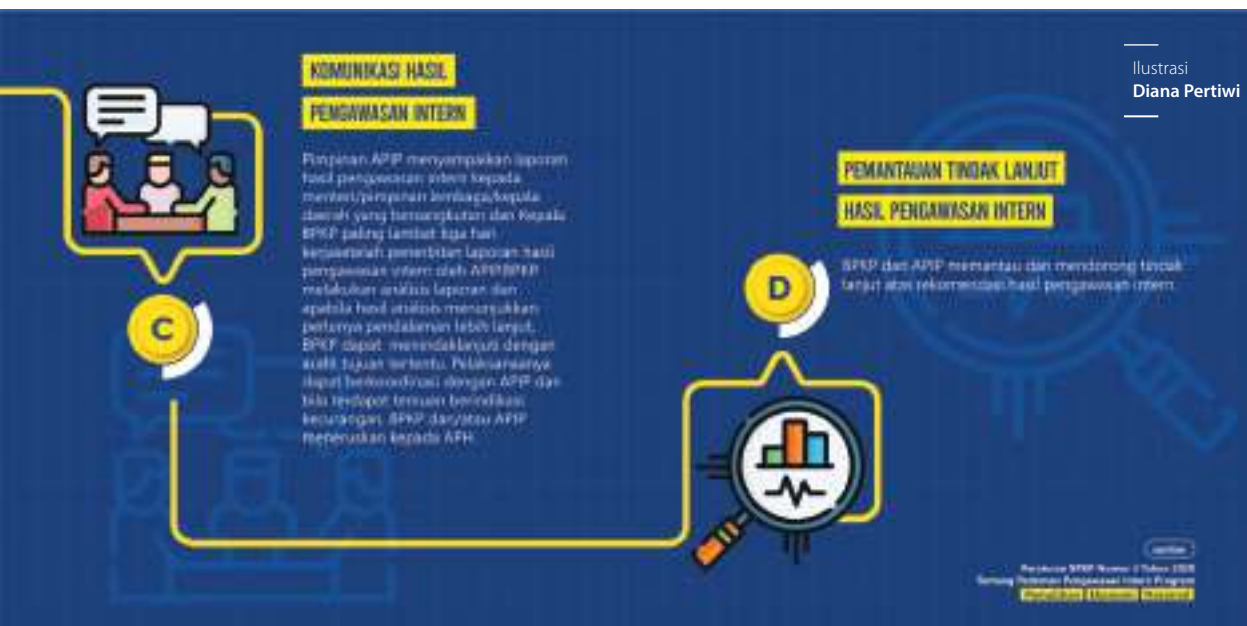
Implementasi program penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, sangat penting

dilakukan secara cepat dan tepat. Pada medio Juni lalu, Presiden Jokowi pernah mengingatkan bahwa seluruh jajarannya untuk memiliki *sense of crisis* yang sama dan bekerja lebih keras lagi mendorong secara signifikan penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Arahan Presiden tersebut perlu disikapi secara proaktif oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam melaksanakan pengawasan internnya. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa pengawasan intern yang dilakukan bukan menghambat implementasi program, tetapi sebaliknya mendorong agar penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Deputi Kepala BPKP  
Bidwas Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Sehat dan Simanullang menegaskan BPKP tidak mempersulit proses pengawasan dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19. Pada *Talkshow* bersama RRI pada bulan Juli lalu, Sehat menjelaskan bahwa BPKP dan APIP selalu mengedepankan peran pendampingan atau *consulting* terlebih dahulu, baru peran penjaminan atau *assurance*. “Fungsi *consulting* yang dilakukan BPKP adalah membantu pelaksana untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga BPKP tidak melihat apa yang sudah dikerjakan, tapi kami mengawal apa yang akan dikerjakan,” ujarnya.

Komite Penanganan  
Covid-19 dan Pemulihan





Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, oleh Presiden ditugaskan untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Sejak dibentuk, Komite ini mampu mengakselerasi implementasi program PC-PEN yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilihat dari akselerasi penyerapan anggarannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI, pada semester 1 tahun 2020, dari anggaran sebesar Rp695,2 triliun baru diserap sebesar Rp124,62 triliun atau sekitar 17,93%. Lalu pada akhir Juli 2020 penyerapan sudah meningkat menjadi Rp147,67 triliun (21,24%), dan meningkat signifikan sekitar Rp63,93 triliun menjadi Rp211,60 triliun (30,44%) pada akhir Agustus 2020. Terakhir, hingga akhir bulan September 2020, realisasi penyerapan

anggaran PC-PEN mencapai 45,4%, yaitu sebesar Rp315,48 triliun dari total pagu Rp695,2 triliun. “Mulai dari Semester I tahun 2020, penyerapan anggaran PEN terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan bulanan sebesar 37%. Pada bulan Agustus 2020 dan September 2020 meningkat signifikan, bahkan pada September 2020 saja realisasinya Rp103,88 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Komite Percepatan PC-PEN (2/10).

#### **Peran Nyata Pengawasan Akuntabilitas**

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN Tahun 2020 yang digelar di kawasan wisata Lagoi Bintan, Provinsi Riau (25/9), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan

bahwa pemerintah optimis, dengan berbekal kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Ditambah perbaikan indikator makroekonomi, akan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan akselerasi penanganan Covid-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, program PC-PEN harus dikawal sejak dini, dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Airlangga mengatakan, “Kami juga mengundang Pimpinan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (BPKP), Aparat Penagak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk bersama-sama memberikan masukan dan rekomendasi, dalam rangka pemenuhan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program PC-PEN ini.” Harapan besar tersebut merupakan bukti bahwa peran BPKP sebagai *trusted advisor* telah diakui oleh kementerian/lembaga. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa “Kepercayaan *stakeholders* harus kita jaga, terutama untuk mewujudkan BPKP yang selalu hadir bermanfaat.”



# Anggaran dan Belanja Penanganan Covid-19

Anggaran Penanganan Covid-19  
sebesar Rp695,2 triliun

## Rincian Per Biaya Penanganan Covid-19

### 1 Biaya Kesehatan

(Rp87,55 triliun), terdiri dari:

- belanja penanganan Covid-19 Rp65,8 triliun,
- insentif tenaga medis Rp5,9 triliun,
- santunan kematian Rp300 miliar,
- bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp3 triliun,
- belanja Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan
- insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.

### 2 Alokasi Perlindungan Sosial

(Rp203,9 triliun), terdiri dari:

- anggaran Program Keluarga Harapan Rp37,4 triliun,
- dana sembako Rp43,6 triliun,
- bantuan sosial Jamboretabek Rp6,8 triliun,
- bangsot Non-Jamboretabek Rp33,4 triliun,
- Program Kartu Prakerja Rp20 triliun,
- diskon listrik Rp6,9 triliun,
- logistik, pangan dan sembako Rp25 triliun, dan
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp31,8 triliun.

### 3 Anggaran Insentif Usaha

(Rp120,61 triliun), terdiri dari:

- anggaran insentif usaha terdiri dari PPh 21 DTP Rp39,66 triliun,
- pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75 triliun,
- pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 triliun,
- pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 triliun,
- penurunan tarif PPh Badan Rp20 triliun, dan
- stimulus lainnya Rp26 triliun.

4

### Biaya Bantuan UMKM

(Rp123,46 triliun), terdiri dari:

- subsidi bunga Rp35,28 triliun,
- penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun,
- belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Rp5 triliun,
- penjaminan modal kerja Rp1 triliun,
- PPh final UMKM DTP Rp2,4 triliun, dan
- pembiayaan investasi kepada korporasi melalui LPDB UMKM Rp1 triliun.

5

### Anggaran Pembiayaan Korporasi

(Rp53,57 triliun), terdiri dari:

- penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya Rp3,42 triliun, dan
- Pengertian Modal Negara (PMN) Rp20,5 triliun:
  - Hutama Karya Rp7,5 triliun,
  - Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp6 triliun,
  - Pemodal Nasiona Madani Rp1,5 triliun,
  - Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation Rp500 miliar, dan
  - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp5 triliun.

Selain itu, dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp29,65 triliun untuk:

- Garuda Indonesia Rp8,5 triliun,
- Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun,
- PTPN Rp4 triliun,
- Krakatau Steel Rp3 triliun,
- Perumnas Rp650 miliar, dan
- PPA Rp10 triliun.

6

### Pembiayaan Sektoral K/L/D

(Rp106,11 triliun), terdiri dari:

- program padat karya K/L Rp18,44 triliun,
- insentif perumahan Rp1,3 triliun,
- pariwisata Rp3,8 triliun,
- Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun,
- cadangan DAK fisik Rp8,7 triliun,
- fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan
- cadangan perluasan Rp 58,87 triliun.

# BELEID

## untuk Payungi Akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembatasan interaksi manusia selama pandemi membuat **perekonomian Indonesia terpukul**. Untuk memulihkannya, pemerintah menerbitkan sejumlah beleid mulai dari peraturan pengganti undang-undang hingga regulasi di tingkat kementerian/lembaga/daerah.

Berikut ini **payung hukum** terkait akuntabilitas Pemulihan Ekonomi Nasional dan bagaimana **peran BPKP** di dalamnya.



### Perpu RI Nomor 1 Tahun 2020

Perpu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang **Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan** Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

**BPKP** sebagai anggota dalam Tim Pelaksana membantu Ketua Pelaksana **mengawal proses pelaksanaan** kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kementerian dalam konteks penanganan dampak Covid-19 dan PEN.

## Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2020



Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang **Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional** dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Dalam peraturan ini disebutkan **BPKP melakukan pengawasan intern** terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

## Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2020



Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang **Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional**.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tersebut ditetapkan Komite yang kelembagaannya mempunyai struktur yang sederhana dan ramping. Komite ini terdiri dari Komite Kebijakan yang **menetapkan program dan kebijakan**, Ketua Pelaksana yang **mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan**, dan Satuan Tugas yang **melaksanakan dan mengendalikan implementasi** di lapangan.

Ilustrasi  
Petrus Sonny



## 27 JURUS PENGAWASAN

Di penghujung masa baktinya, Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017-2020) Bonny Anang Dwijanto meluncurkan 27 Produk Pengawasan pada Deputy Akuntan Negara. Produk tersebut terdiri dari lima peraturan deputi, lima belas pedoman, dan tujuh aplikasi. Lebih lanjut, untuk menanggapi permasalahan akibat pandemi Covid-19, Deputy Bidang Akuntan Negara BPKP akan kembali meluncurkan sembilan pedoman dan dua aplikasi, serta beberapa pedoman lainnya berupa Pedoman Reviu ISO dan Pedoman PMN.

Beberapa pedoman yang akan diluncurkan di antaranya adalah Pedoman GCG, Pedoman Reviu Aksi Korporasi BUMN, Pedoman I-KOMPAK, Pedoman Pengawasan Intern Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN, Pedoman Reviu Pemberian Insentif bagi Nakes yang Menangani Covid-19, serta beberapa pedoman lainnya. Adapun tujuh aplikasi yang akan diluncurkan adalah aplikasi GCG, aplikasi SPI, aplikasi Maturitas MR, aplikasi profil mitra kerja, aplikasi evaluasi kinerja, aplikasi BERAS PANDAN, dan aplikasi reviu insentif tenaga kesehatan.

## 3 TANTANGAN APIP DI MASA PANDEMI

Dalam Seminar Sinergi Pengawasan APIP, SPI, APH dalam Pengawasan Program Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Deputy Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Sehat Simanullang memaparkan urgensi optimalisasi peran APIP dalam mengawal PC-PEN dan tantangan dalam pengawasan intern di masa darurat pandemi. Penyerapan anggaran yang masih rendah, angka kasus Covid-19 yang masih relatif tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah tiga tantangan yang harus dihadapi oleh APIP saat ini. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi penting untuk memberikan nilai tambah pengawasan. Pengawasan oleh APIP harus bisa mendukung kecepatan, ketepatan, harmonisasi dan ketepatan waktu. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bantuan APIP dibutuhkan sejak aspek rancangan pada proses perencanaan hingga pengawasan untuk memastikan program tepat sasaran.





## SATU DEKADE OPINI WTP DAN BMN AWARDS

Di kali kesepuluhnya BPKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya, kini BPKP juga berhasil menyabet BMN Awards. Dalam penyerahan penghargaan secara virtual dari Menteri Keuangan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa mempertahankan raihan tersebut dari tahun ke tahun membutuhkan konsistensi dan kerja keras. Namun, ia berpesan, WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan bernegara.

## FASE III UJI KLINIS PRODUKSI VAKSIN

Uji klinis pembuatan vaksin tengah memasuki fase ketiga, sebagai bagian dari *monitoring*, BPKP melakukan *entry meeting* dengan PT Bio Farma. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari *monitoring* dalam kerja sama pembuatan vaksin dengan Sinovac Biotech Ltd. Produksi vaksin ini sendiri akan dimulai awal tahun 2021 sebanyak 250 juta dosis vaksin. PT Bio Farma mengapresiasi saran dan masukan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang kala itu didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan program pembuatan vaksin dapat berjalan cepat, aman, dan akuntabel.

## BPOM BANGUN *FRAUD CONTROL PLAN*

Di hadapan 256 peserta, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menyampaikan apresiasi atas komitmen BPOM untuk meningkatkan tata kelola melalui implementasi *Fraud Control Plan* (FCP). Dalam *workshop* dengan tema “*Fraud Control Plan* Pengawasan Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Penanganan Covid-19 oleh BPOM” ini, Arumsari menyebutkan, FCP Tematik-Penilaian Risiko Kecurangan pada Penanganan Covid-19 di BPOM adalah salah



satu kegiatan preventif sekaligus edukatif dalam mencegah adanya hambatan kelancaran pembangunan.

## INTIP FOKUS PEMERINTAH AWASI DANA DESA

Perputaran ekonomi desa merupakan salah satu penangkal resesi dan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah meminta agar penerapan Dana Desa ini betul-betul diawasi. Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pertama adalah mengawal akuntabilitas keuangan desa dengan memberikan pendampingan pengelolaan keuangan desa. Kedua, memberikan saran dan masukan kepada kementerian terkait agar implementasi Dana Desa lebih efektif atau tepat sasaran. Ketiga, menyelenggarakan bimbingan teknis dan konsultasi keuangan desa, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah kegiatan sinergi antara BPKP bersama Komisi XI DPR RI, dan Komite IV DPD RI. Sinergi ini bertujuan untuk memotret kondisi dan permasalahan riil di lapangan. Dadang berpesan praktik penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) harus tetap mengikuti aturan dan diprioritaskan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.



## KETOK PALU BIAYA TERTINGGI TES USAP (SWAB)

Sebelumnya, BPKP telah melakukan estimasi usulan harga PCR *swab test* sebesar Rp797.000,00 per spesimen untuk perorangan. Atas usulan tersebut, Kementerian Kesehatan dan BPKP melakukan evaluasi secara periodik dengan memperhitungkan perubahan harga dalam komponen yang dibutuhkan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan bersama awal Oktober 2020, Kementerian Kesehatan pun menetapkan harga tertinggi tes usap mandiri ini sebesar Rp900.000,00 dengan surat edaran yang mengimbau seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan implementasi batasan harga ini terhadap seluruh fasilitas kesehatan di provinsi dan kota masing-masing.



**YANG BARU  
DI MEDIA SOSIAL  
BPKP!**



# TikTalk

Tips dan Informasi  
Kekinian Talk



f BPKPGOID  
t @BPKPGOID  
i @BPKP\_ID

# LANGKAH SEDERHANA MENUJU DAERAH HEBAT

*“Kehebatan sebuah daerah dilihat dari seberapa kuat karakter yang dimilikinya dan seberapa besar keinginan orang untuk tinggal di sana.”*

Bergman Siahhaan

Musim pemilihan kepala daerah telah tiba. Semua orang merajut asa untuk melihat daerahnya menjadi hebat. Penduduk ingin menikmati hidup di daerah yang hebat dan pemimpin ingin mempersembahkan daerah yang hebat kepada warganya. Niat baik itu tak perlu diragukan lagi. Tetapi, bagaimana membuat daerah yang hebat atau setidaknya lebih baik? Pertanyaan itu yang selalu didiskusikan dari periode ke periode pemerintahan dan diapung-apungkan di setiap masa kampanye.

Artikel ini tidak berisi teori perencanaan daerah secara menyeluruh. Tidak pula menawarkan jurus sakti melejitkan daerah yang penuh keterbatasan dan ketertinggalan menjadi setara dengan kota-kota besar di negara maju. Artikel ini coba mengingatkan langkah-langkah

sederhana yang bisa dipertimbangkan calon pemimpin untuk membuat daerahnya hebat.

## Kota Layak Huni

Satu hal mendasar mengenai “daerah hebat” adalah kelayakan huninya. Semakin layak huni sebuah kota, maka semakin bahagialah penduduknya dan semakin senang pula pengunjung mendatangnya. Semakin senang pengunjung datang, maka semakin besar perputaran ekonomi di kota tersebut. Beberapa lembaga kredibel di dunia, seperti OECD, Mercer, *Monocle Magazine*, *The Economist*, dan *Forbes* mengukur kelayakan huni kota-kota di dunia secara berkala. Masing-masing lembaga menggunakan indikator yang berbeda-beda meski masih seirama.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mengeluarkan peringkat kota layak huni di seluruh dunia (“The Global,” 2020). EIU adalah divisi riset dan analisa dari The Economist Group yang sejak 1946 berkontribusi kepada dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam mengarungi perubahan dunia. EIU mempertimbangkan lebih dari 30 faktor dalam menyusun *ranking*. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam enam kategori besar,





yaitu stabilitas, budaya, lingkungan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Selama dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019, ibu kota Austria, Vienna, menduduki peringkat pertama pada daftar kota layak huni. Sebelumnya, posisi puncak itu ditempati Kota Melbourne, Australia, selama tujuh tahun berturut-turut (Locke, 2019). Sementara menurut konsultan internasional Mercer, Vienna selalu menempati posisi pertama *Best Living Quality City* sejak tahun 2009 (*"Quality,"* n.d.). Vienna dianggap berhasil memadukan tradisi imperial klasik dan kreativitas kontemporer. Vienna juga merupakan kota yang memiliki rasio ruang terbuka hijau terbesar di Eropa (*"Vienna,"* n.d.).

Indonesia sendiri punya versi kota layak huni berdasarkan tujuh indikator yang diukur oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP). Ketujuh indikator itu adalah (Shita, n.d):

1. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, kecukupan pangan, dan lainnya);
2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan,

- dan lainnya);
3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas;
4. Keamanan dan keselamatan;
5. Kualitas lingkungan;
6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota; dan
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kota Solo adalah kota yang paling layak huni di Indonesia berdasarkan survei IAP pada tahun 2019. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Palembang dan Kota Balikpapan (*"Hasil,"* 2019). Sementara tiga kota yang paling tidak layak huni secara berurutan ke bawah adalah Lampung, Medan, dan Makassar. Peringkat itu diperoleh berdasarkan skor akhir atas penilaian ketujuh indikator di atas. Di mana Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya? Bahkan dua kota besar seperti Medan dan Makassar terpuruk di posisi bawah. Tergambar dari peringkat di atas bahwa kemegahan dan gedung pencakar langit tidak menjadikan sebuah kota nyaman ditinggali. Sebuah kota tentu tidak menjadi hebat jika tak nyaman ditinggali.

### **Tiga Langkah Menuju Daerah Hebat**

Pada tahun 2030, diperkirakan 60 persen penduduk bumi, yakni 5 miliar orang, akan tinggal di kota-kota (Woetzel, Bouton, Cis, Mendonca, Pohl, Remes dan Ritchie, 2013). Peningkatan itu sangat pesat melihat data bahwa pada tahun 2013 hanya sekitar 3,6 miliar orang yang tinggal di kota. Hal ini menjadi tantangan yang berat bagi para pemimpin kota karena kompleksitas permasalahan yang juga semakin meningkat. Kualitas hidup di kota-kota menjadi aspek yang

semakin mengkhawatirkan. Kepadatan penduduk di kota akan meningkatkan permasalahan infrastruktur, kebersihan, perumahan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan.

Tantangan yang dihadapi pemimpin kota memang berbeda-beda tergantung titik awal (*starting point*) mereka mulai bekerja. Meski demikian, menurut Woetzel et al., kota *toh* tetap bisa berubah. Singapura misalnya, naik dari pelabuhan kolonial ke kota kelas dunia hanya dalam beberapa dekade. New York bergerak maju dari penurunan ekonomi pada akhir ‘60-an dan ‘70-an. Hal itu terjadi karena para pemimpin membuat langkah-langkah penting dalam meningkatkan kota mereka, tidak peduli di mana titik awal mereka memulai.

Lembaga konselor McKinsey & Company melakukan penelitian dengan mengembangkan dan menganalisis *database* komprehensif indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perkotaan. Mereka mewawancarai 30 wali kota dan pemimpin kota lainnya di pemerintah kota di empat benua.

Mereka juga menyintesis temuan atas lebih dari 80 studi kasus untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan para pemimpin kota di dunia untuk meningkatkan seluruh jajaran proses dan layanan, dari perencanaan kota hingga manajemen keuangan dan perumahan.

McKinsey & Company kemudian menyimpulkan bahwa tiga langkah yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin di dunia untuk membuat kota mereka hebat adalah:

1. Mencapai pertumbuhan cerdas (*achieve smart growth*);
2. Berbuat lebih banyak dengan

- modal yang lebih sedikit (*do more with less*);
3. Memenangkan dukungan untuk perubahan (*win support for change*).

Untuk melihat tiga langkah untuk membangun kota hebat tersebut secara lengkap, silakan unduh dokumen McKinsey & Company di tautan pada artikel. Namun secara ringkas, tiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**“Achieve smart growth,”** maksudnya memilih sektor pembangunan yang paling sedikit menyebabkan kerugian.

Kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memperluas zona industri, memperlebar jalan-jalan dengan menghilangkan pepohonan, mengizinkan pembangunan di daerah aliran sungai, atau membebaskan pedagang berjualan di mana saja, pada akhirnya akan menurunkan tingkat kenyamanan dan kualitas hidup di kota itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering justru membawa kerugian pada warga akibat dampak-dampak pembangunan.

**“Do more with less,”** maksudnya efisiensi dalam menggunakan anggaran. Sudah menjadi stigma bahwa pemerintah daerah dianggap menghambur-hamburkan anggaran dengan hasil yang tidak terlihat.

Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi. Swasta harus lebih banyak dilibatkan dalam program dan kegiatan daerah. Hal ini juga jamak dilakukan kota-kota di negara maju.

Sementara, **“Win support for change,”** berarti bahwa pembangunan kota hebat harus dimulai dengan pembangunan tim yang kuat.

Woetzel et al. menyebutkan, pegawai negeri sipil yang berkinerja tinggi, menciptakan lingkungan kerja di mana semua karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mengambil setiap kesempatan untuk mewujudkan konsensus para pemangku kepentingan.

### **Langkah Sederhana**

Mengejar peningkatan semua indikator kota layak huni yang disebutkan beberapa lembaga di atas adalah hal yang sempurna. Perubahan menuju terciptanya kota layak huni tersebut mungkin saja

bisa tercapai secara signifikan dalam jangka panjang. Akan tetapi rasanya sulit terwujud dalam jangka menengah, misalnya dalam lima tahun periode kepemimpinan kepala daerah.

Tiap daerah memiliki karakter dan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Pada umumnya, kota-kota di Indonesia masih berkatut pada standar kehidupan sehari-hari seperti lalu lintas,

persampahan, dan fasilitas lainnya, berbeda dengan kota-kota di negara maju. Untuk itu, diperlukan langkah yang juga sederhana, namun bisa membawa kota lebih baik sedikit demi sedikit, dari tahun ke tahun. Tiga langkah ala McKinsey & Company, misalnya, bisa diimplementasikan seperti berikut ini:



## Epilog

Para pemimpin sering terjebak dalam teori dan konsep yang kompleks. Wacana-wacana yang rumit, sebagian bahkan *absurd*, sering diutarakan pemimpin dan calon pemimpin. Mengejar semua indikator pembangunan memang hal yang sempurna. Hanya saja, kesempurnaan adalah hal yang sulit dicapai dalam waktu singkat jika enggan menggunakan kata “mustahil”.

Tiga langkah ala McKinsey & Company di

atas juga bisa menjadi rumit jika dirinci satu per satu lalu dikerjakan sekaligus. Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, mulai dari hal-hal sederhana dan rasional yang bisa diukur. Kajian-kajian teknis tentu sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pokok pikiran artikel sederhana ini menjadi kebijakan yang nyata.

## Referensi:

Hasil Survey, Inilah Daftar Kota Layak dan Tidak Layak Huni di Indonesia. (2019, 19 Februari). *Indozone*. <https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/PisajR/hasil-survey-inilah-daftar-kota-layak-dan-tidak-layak-huni-di-indonesia/read-all>

Locke, T. (2019, 4 September). These are the World's Most Liveable Cities in 2019. *CNBC*. [https://www.cnbc.com/2019/09/04/global-liveability-](https://www.cnbc.com/2019/09/04/global-liveability-index-2019-most-liveable-cities-in-the-world.html)

[index-2019-most-liveable-cities-in-the-world.html](https://www.cnbc.com/2019/09/04/global-liveability-index-2019-most-liveable-cities-in-the-world.html)

Shita, G. (n.d.) Seberapa Layak Huni Kota-kota di Indonesia. *Handal Selaras Group*. <https://www.handalselaras.com/seberapa-layak-huni-kota-kota-di-indonesia/>

The Global Liveability Index 2019. (2020). *The Economist Intelligence Unit*. [https://www.eiu.com/public/topical\\_report.](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=liveability2019)

[aspx?campaignid=liveability2019](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/how%20to%20make%20a%20city%20great/how_to_make_a_city_great.pdf)

Woetzel, J., Bouton, S., Cis, D., Mendonca, L., Pohl, H., Remes, J., & Ritchie, H. (2013). *How To Make A City Great*. McKinsey & Company. [https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/how%20to%20make%20a%20city%20great/how\\_to\\_make\\_a\\_city\\_great.pdf](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/how%20to%20make%20a%20city%20great/how_to_make_a_city_great.pdf)

# BERGERAK LINCAH MENGAWAL PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Yulia Pramita Rahman,  
Auditor Muda pada Puslitbangwas BPKP

*Jack be nimble,  
Jack be quick,  
Jack jump over  
The candlestick.  
Jack be nimble  
Jack be agile,  
Jack jump over the box  
marked "fragile".*

Sebagai penggal lagu anak-anak ini seolah mengingatkan kita untuk bergerak secara cepat, lincah, dan gesit. Konon, melompati lilin di dalam lagu tersebut bermakna jika anak tersebut berhasil melompati lilin tanpa mematikan apinya, maka akan bernasib baik. Sebaliknya, apabila tidak berhasil, maka ia akan bernasib buruk. Lalu, apa hubungannya dengan organisasi?

Lagu ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan konsep *agile* yang saat ini sedang populer. Istilah *agile* pertama dikenal dalam pengembangan *software* yang kemudian diadaptasi di berbagai bidang dan organisasi. Konsep *agile* dilatarbelakangi adanya perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis atau biasa disebut VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*) (Pasmore, 2010).

## Dinamika Perubahan Lingkungan

Kriteria VUCA sudah cukup tepat menggambarkan bagaimana kondisi dunia dengan adanya Covid-19, di mana terjadi perubahan skala besar (*volatility*), kesulitan melakukan prediksi secara akurat (*uncertainty*), kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait (*complexity*), dan

ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya (*ambiguity*). Kriteria tersebut terlihat pada krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang hadir bersamaan sebagai buah dari pandemi, yang merambah ke ratusan negara dan teritorial di semua benua, kecuali Antartika. Negara-negara di seluruh dunia tergopoh-gopoh merespon wabah Covid-19 dengan informasi yang terbatas dan banyak ketidakpastian. Demikian kemampuan negara untuk lebih gesit dan adaptif harus ditekankan, terutama dalam hal waktu, tindakan/kebijakan, tingkat sentralisasi keputusan, otonomi keputusan dan keseimbangan antara perubahan dan stabilitas (Janssen & Voort, 2020).

Jumlah angka kasus infeksi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 275.213 orang dengan kasus kematian 10.386 jiwa (data per 27 September 2020). Tidak satupun provinsi yang luput dari serangan virus yang menyebar

di 496 kabupaten/kota atau 96,5 persen dari 514 kabupaten/kota di Indoensia. Hal ini turut berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mengalami penurunan alias minus 5,32 persen.

Pemerintah dengan program PEN berupaya keras untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp695,2 triliun. Namun, untuk menjaga agar alokasi dana yang digelontorkan tersebut dikelola secara tepat, cepat, serta akuntabel, tentunya diperlukan peran pengawas intern sebagai pengawalnya.

### **Tak Sekadar *Agile*, Tapi Juga Bernilai**

Dalam dunia pengawasan, penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan pasal 4, Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dilaksanakan dengan adanya koordinasi dan sinergi antara BPKP dengan APIP lainnya. Pengawasan program PEN tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan *Governance, Risk, and Control* (GRC) yang baik dalam koridor ketentuan perundang-undangan (Haqie, 2020). Adapun titik pengawasan yang harus difokuskan dalam PEN menurut Widodo (2020), yaitu pada Program Penyertaan Modal Negara (PMN), Program Penempatan Dana, Program

Investasi Pemerintah, Program Penjaminan Modal Kerja UMKM, dan Subsidi Bunga.

Terkait *mindset* dan metode kerja, tentunya pendekatan tradisional sudah selayaknya ditingkatkan menjadi lebih baik dengan adanya inovasi *agile internal audit*. Seperti diungkapkan Worley & Jules (2020) bahwa perlu adanya perubahan terhadap praktik pada organisasi agar lebih gesit dan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi yang mudah berubah, tidak pasti, kompleks, dan ambigu (VUCA) pada masa pandemi saat ini. Apabila cara yang dilakukan masih sama dengan sebelumnya, seperti 10, 15, atau 20 tahun yang lalu, maka dapat dikatakan bahwa fungsi audit telah gagal berkembang (Truong, 2020). Oleh karena itu, dunia pengawasan perlu berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi relevan. Dengan demikian, kehadiran dan kebermanfaatan pengawas intern tentunya akan lebih dirasakan.

Konsep *agile* memiliki 4 nilai yang dituangkan dalam *agile manifesto* yang secara garis besar mengedepankan interaksi yang intens, kolaboratif, penggunaan IT, dan merespon perubahan. Nilai-nilai tersebut tentunya relevan apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan di era VUCA ini, khususnya poin kolaboratif. Hal ini diamini oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2020 bahwa luasnya area penanganan dan besarnya anggaran yang digunakan dalam mengawal PEN membutuhkan pengawasan kolaboratif antara APIP, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

### ***Agile Internal Audit***

Pada sektor audit internal, literatur mengenai *agile* dalam audit internal masih didominasi oleh sektor privat. Nilai-nilai dan prinsip penerapan *agile internal audit* banyak dikembangkan oleh Pricewaterhouse Coopers dan Deloitte. Pada sektor pemerintahan, literatur yang ada masih bersifat umum dan belum sampai pada praktik penerapannya. Meskipun sudah ada beberapa kajian mengenai *agile* di pemerintahan, pada praktiknya masih saja terdapat tantangan tersendiri. Mergel & Whitford (2020) menyatakan bahwa penerapan konsep *agile*

pada sektor pemerintahan memiliki tantangan, seperti *agile* yang dinilai bertentangan dengan garis birokrasi khas organisasi pemerintahan, *agile* membutuhkan bentuk kepemimpinan baru, serta *agile* membutuhkan perubahan bentuk kontrak dan pengadaan. Sementara itu dalam audit internal, Deloitte (2018) mengemukakan bahwa tantangan terletak dalam pemberian *insight* yang lebih dalam tentang masalah dan risiko bisnis yang strategis; menanggapi dengan cepat perubahan prioritas dan masalah yang timbul akibatnya; terdepan dalam mengantisipasi risiko; melakukan perubahan menjadi perencanaan, serta pelaksanaan audit berbasis risiko; menyederhanakan kertas kerja; memberikan laporan yang berdampak, relevan, tepat waktu, dapat dibaca, dan bersifat visual; memiliki kompetensi terhadap proyek yang dikerjakan, serta memperdalam kompetensi khususnya pada *cyber* dan data analitik.

Konsep *agile* memang masih terbilang baru untuk sektor pemerintahan, namun prinsip-prinsip nilai yang dianut dalam *agile* bukan hal baru bagi BPKP. Keempat nilai dalam *agile manifesto* sebagian besar sudah tercermin dalam prinsip nilai BPKP, yaitu PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, serta Responsif). Dari sisi metode kerja, BPKP juga sudah mulai menerapkan pendekatan *agile* dengan membuat tim gabungan dengan kolaborasi lintas fungsi dan lintas kompetensi yang berjalan baik, contohnya dalam penugasan Audit Tujuan Tertentu BPJS (Puslitbangwas, 2019). Namun demikian,

untuk menerapkan pendekatan *agile* secara penuh tentu bukanlah hal yang mudah, serta memerlukan waktu.

Dalam mengawal program PEN, menerapkan pendekatan yang *agile* diperlukan kesiapan dalam berkolaborasi, kesiapan dalam mengantisipasi perubahan, serta risiko yang akan terjadi harus mulai dipetakan. Langkah awal dalam berkolaborasi dan bersinergi sudah dilaksanakan dengan adanya Rakornas Wasin Tahun 2020 untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern dalam mengawal program PEN dengan efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalur komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat dilakukan komunikasi dan interaksi yang intens. Dengan demikian, pengawas intern diharapkan dapat hadir dan bermanfaat dalam mengawal program PEN dengan pendekatan yang *agile*, yaitu mengedepankan interaksi yang intens, kolaboratif, memanfaatkan IT, dan merespon perubahan diharapkan dapat menjadi suatu alternatif dalam mengawal PEN di masa pandemi. *So, can we be as agile as jack?*

## Referensi:

- Bill Pasmore PhD, S. V. P. (2010). Leadership agility: A business imperative for a VUCA world. *People and Strategy*, 33(4), 32.
- BPKP. (2020). Rakornas Wasin 2020, Sinergi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Siaran Pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020
- Deloitte, 2018, Becoming Agile A Guide to Elevating Internal Audit's Performance and Value: Part 1: Understanding agile internal audit
- Elzami Haqie.(2020). Sinergi APIP Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional. <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/718>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the Covid-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 102180
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2020). Agile: A New Way of Governing. *Public Administration Review*.
- PERKA BPKP No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Truong, L. (2020). AGILE AUDITING: MORE VALUE, LESS RESOURCES. *EDPACS*, 62(1), 4-7.
- Tim Peneliti Puslitbangwas. (2019). Kajian Agile Internal Audit
- Widodo, Agus PP. (2020). Pengawasan Titik-Titik Kritis Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Dampak Covid-19. (disampaikan dalam acara Library Café, 3 Juli 2020)
- Worley, C. G., & Jules, C. (2020). Covid-19's Uncomfortable Revelations About Agile and Sustainable Organizations in a VUCA World. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 56(3), 279-283.



## FAQ SEPUTAR PENGENDALIAN INTERNAL

### Jawaban

Penyelenggaraan SPIP merupakan hal yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terkait pengelolaan risiko, selain telah diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pelaksanaan dari unsur SPIP kedua (Penilaian Risiko) juga telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam RPJMN 2020-2024. Meskipun demikian, penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan pengelolaan risiko diharapkan bukan dipandang sebagai suatu keharusan, tetapi sebagai kebutuhan dan sarana pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.



**“Kebijakan apa yang mengharuskan pemerintah daerah menyelenggarakan SPIP dan pengelolaan risiko?”**

**“Untuk *risk register* dan RTP yang telah disusun terdapat formulir pemantauan yang digunakan untuk memonitor peristiwa risiko, pelaksanaan RTP, dan efektivitas RTP. Namun, untuk pelaksanaan informasi dan komunikasi apakah ada *form* khusus untuk memantaunya?”**



### Jawaban

Dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, pemantauan atas pelaksanaan informasi dan komunikasi menjadi satu *form* dengan *form* rancangan pelaksanaan informasi komunikasi, di mana untuk realisasi pelaksanaan informasi dan komunikasi dapat diisi pada kolom Realisasi Waktu Pelaksanaan. Untuk menginformasikan hal-hal terkait pelaksanaan informasi dan komunikasi, termasuk efektivitasnya untuk sementara dapat diisi pada kolom Keterangan.



**“Bagaimana struktur pengelolaan risiko yang seharusnya? Apakah harus struktur pengelola tersendiri ataukah bisa dilekatkan pada fungsi tertentu (menjadi tambahan tupoksi)?”**

#### **Jawaban**

Dalam Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, terdapat contoh stuktur pengelolaan risiko dengan membagi kewenangan/fungsi pengelolaan risiko menjadi enam, yaitu Penanggung Jawab, Koordinator Penyelenggaraan, Unit Pemilik Risiko, Komite Pengelolaan Risiko, dan Unit Kepatuhan, dan Penanggungjawab Pengawasan. Pembagian tersebut telah mempertimbangkan *Three Lines of Defense*, yaitu (*1st Line*: Unit Pemilik Risiko, *2nd Line*: Unit Kepatuhan, dan *3rd Line*: Penanggung Jawab Pengawasan). Meskipun dalam peraturan tersebut telah dicontohkan siapa yang dapat mengisi struktur tersebut, tetapi dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing pemerintah daerah. Hal yang perlu dipastikan hanyalah adanya fungsi-fungsi tersebut dalam struktur pengelolaan risiko. Dalam penetapan struktur, apabila memang memungkinkan dapat langsung ditambahkan sebagai tambahan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing OPD melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja OPD.



**“Dari kerangka menuju proses pengelolaan risiko, mengapa perlu dilakukan identifikasi lingkungan pengendalian intern melalui *Control Environment Evaluation* (CEE)? Apa korelasinya dengan risiko yang kita identifikasi?”**

#### **Jawaban**

CEE diperlukan untuk mengetahui gambaran umum kelemahan-kelemahan pengendalian intern yang dapat memicu risiko, yang mungkin tidak terdeteksi melalui FGD yang hanya mengidentifikasi risiko dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan pemahaman/pengalaman peserta FGD. Selanjutnya, CEE digunakan untuk menentukan besaran Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan dibuat untuk merespon risiko. RTP yang akan dibuat harus mempertimbangkan kelemahan lingkungan pengendalian agar dalam pelaksanaannya dapat efektif.

**“Selama ini pemerintah daerah dan OPD sudah dapat menyusun risiko operasional, tetapi untuk risiko strategis belum terlalu familiar. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan OPD terkait perumusan risiko strategis?”**



#### **Jawaban**

Terkait penetapan konteks, sebenarnya tidak perlu mencantumkan seluruh sasaran yang terkait dengan tujuan yang akan diidentifikasi risikonya. Sasaran yang dimasukan dapat dipilih satu atau beberapa sasaran saja, yaitu sasaran yang dinilai paling mempengaruhi pencapaian tujuan.

**“Bagaimana caranya agar daftar risiko yang disusun merupakan risiko yang memang benar-benar terkait dengan tujuan pemerintah daerah sehingga Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah?”**



#### **Jawaban**

Pertama, pada saat proses pengidentifikasian risiko harus merujuk pada dokumen perencanaan yang telah disusun (RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD). Selain itu, proses pengidentifikasian risiko sebaiknya dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan, baik struktural maupun staf teknis yang benar-benar menguasai proses bisnis, bukan hanya Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan OPD. Dalam prosesnya, peserta FGD diharapkan jujur dan tidak menutup-nutupi kondisi yang ada pada pemerintah daerah maupun OPD sehingga semua risiko dapat teridentifikasi.

Dalam perumusan penyebab, peserta FGD juga diharapkan mampu merunut hingga akar penyebab (*root cause*) dan tidak mudah memutuskannya sebagai penyebab yang disebabkan oleh pihak eksternal dan bersifat uncontrollable, sehingga RTP yang disusun dapat lebih efektif.



**“Apabila suatu tujuan memiliki beberapa sasaran, apakah seluruh sasaran tersebut perlu ditetapkan konteksnya sebelum pengidentifikasian risiko?”**

#### **Jawaban**

Terkait penetapan konteks, sebenarnya tidak perlu mencantumkan seluruh sasaran yang terkait dengan tujuan yang akan diidentifikasi risikonya. Sasaran yang dimasukkan dapat dipilih satu atau beberapa sasaran saja, yaitu sasaran yang dinilai paling mempengaruhi pencapaian tujuan.



**“Bagaimana mekanisme informasi dan komunikasi, pemantauan, dan tindak lanjut atas tingkat keterjadian risiko dan RTP yang baik, efektif, efisien, tepat dan mudah dilakukan oleh pemerintah daerah?”**

#### **Jawaban**

Dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi harus dirancang terlebih dahulu mekanisme. Hal terpenting yang harus disampaikan adalah *risk register* beserta RTP-nya. Selanjutnya, ditetapkan media penyampaian informasinya, siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan menerima informasi, rencana waktu pelaksanaan, dan kemudian dipantau realisasi pelaksanaannya. Pemantauan terhadap RTP sangat bergantung pada kualitas RTP yang disusun dan rancangan pemantauan yang disusun. RTP yang baik memuat dengan jelas tindak pengendalian yang harus dilakukan beserta *timeline* pelaksanaannya. Selain itu, harus terdapat rancangan pengomunikasian atas RTP yang telah disusun kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya dalam pemantauan, yang perlu dilakukan adalah memantau bahwa RTP telah dikomunikasikan/disosialisasikan, telah dilaksanakan sesuai *timeline*, dan memastikan efektivitasnya. Apabila RTP belum efektif dan risiko masih terjadi, perlu dicatat untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dan dirumuskan kembali pengendalian yang lebih tepat.

# GOTONG ROYONG BANGKITKAN (KEMBALI) EKONOMI DAERAH

**Ilham Nurhidayat,**

Koordinator Kelompok Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah  
Perwakilan BPKP Provinsi DIY

## **Dampak Pandemi terhadap Aktivitas Ekonomi**

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) benar-benar menghantam berbagai sendi kehidupan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Pandemi ini tidak hanya menghantui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berimbas pada aspek sosial dan ekonomi. Alih-alih mengendalikan laju penyebaran virus dengan pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat (*social distancing*), berbagai aktivitas ekonomi ikut terhenti. Saat ini situasi seperti ini menjadi sebuah kondisi yang dilematis sekaligus risiko yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dihadapi bersama dengan segala konsekuensinya.

Kondisi tidak kondusif tersebut menjadi perhatian Bank Dunia dalam Laporan Prospek Ekonomi Global terbarunya yang mencatat bahwa dampak krisis akibat Pandemi Covid-19 lebih parah dari krisis manapun di dunia yang pernah terjadi sejak tahun 1870. Ada hal unik dari dampak Pandemi Covid-19. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menjadi sektor paling rentan kena hantaman pandemi Covid-19. Sektor ini disebut para ekonom tak mampu lagi menjadi penyangga

perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 dan 2008. Ketika Indonesia dihantam krisis moneter 1998, UMKM mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian. Demikian pula ketika kembali terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, UMKM tetap kuat menopang perekonomian.

World Bank memprediksi perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang besar hingga kisaran minus 5,2% di tahun 2020. Senada dengan prediksi Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam OECD Economic Outlook Juni 2020 juga memproyeksikan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) global turun sebesar 6% dan mencapai angka negatif 7,6% dengan prakiraan gelombang pandemi kedua terjadi di penghujung tahun 2020. Melemahnya indikator ekonomi tersebut harus diwaspadai dengan serius. Pasalnya, penurunan ekonomi yang tajam berpotensi mengundang gelombang “tsunami” ikutannya berupa peningkatan angka pengangguran serta penurunan daya beli masyarakat yang dapat bermuara pada peningkatan angka kemiskinan dan kelaparan.

## **Intervensi Pemerintah Memitigasi Dampak Ekonomi akibat Pandemi Covid-19**

Untuk memitigasi berbagai risiko dan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, Presiden Jokowi telah memberikan komando dalam mengambil langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menerbitkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN

TA 2020 untuk mengakselerasi belanja negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah Pusat memberi stimulus kepada Pemerintah Daerah (pemda) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di daerah sebagai dampak Covid-19 yang dananya bersumber dari APBN (Bagian Anggaran BUN).

Pemerintah mengalokasikan dana Cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun untuk 10 bidang DAK Fisik dan mengutamakan kegiatan padat karya serta penggunaan tenaga dan bahan lokal. Alokasi DID Tambahan sebesar Rp5,00 Triliun juga disediakan untuk menjaga agar dunia usaha daerah tetap dapat bertahan hidup. Selain itu, Pinjaman PEN Daerah disiapkan pemerintah sebesar Rp10,00 Triliun, diperuntukan untuk pinjaman program atau kegiatan bagi pemda yang membutuhkan. Pinjaman tersebut merupakan salah satu bentuk Investasi Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Upaya pemulihan ekonomi di daerah tentunya tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Pemda juga diminta ikut andil melalui *refocussing* dan realokasi anggaran, dengan cara melakukan optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD TA 2020. Pemda juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan langsung dalam BTT, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk beberapa kegiatan, seperti misalnya pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk menjaga ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat. Dana PEN di daerah juga diperuntukan untuk program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Kegiatan lainnya seperti peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kegiatan rapat dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap Lembaga keuangan serta pengoptimalan *platform* digital dalam kegiatan pemasaran. Program PEN juga menysar

perluasan target/sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di daerah, promosi investasi domestik maupun internasional, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan serta kegiatan PEN lainnya.

### **Bersama Membangkitkan Kembali Ekonomi Lokal**

Upaya pemulihan ekonomi nasional di daerah bukan semata-mata menjadi kewajiban pemerintah. Seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta dan bahu membahu melewati situasi yang sulit secara bersama-sama. Di tengah kesulitan, sangat jamak muncul berbagai ide, gagasan, inovasi dan kreativitas dari berbagai pihak di berbagai daerah. Ada berbagai cara yang diupayakan oleh warga masyarakat dan berbagai komunitas untuk membantu satu sama lain di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu contoh inspirasi adalah gerakan berbagi sembako yang awalnya diinisiasi di kota Yogyakarta. Berbagi sembako yang dilakukan dengan cara unik, tidak dibagikan secara langsung namun dilakukan dengan sistem *canthelan*. Istilah “**Canthelan**” berasal dari bahasa Jawa yang artinya “*membagikan makanan dengan cara digantungkan*”. Gerakan *Canthelan* merupakan salah satu manifestasi dari program ketahanan pangan. Gerakan ini relatif tidak memerlukan modal besar karena seluruh pengadaan bantuan *canthelan* sembako diperoleh dari penggalangan dana melalui berbagai grup di media sosial. Gerakan *Canthelan* hingga saat ini telah tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Gerakan *Canthelan* selain menjaga ketahanan pangan masyarakat juga menguatkan solidaritas masyarakat.





Orang yang membutuhkan dapat mengambil sembako dari canthelan ketika memerlukan dan sebaliknya bagi yang merasa mampu dapat menitipkan dan membagikan sembako kepada yang membutuhkan.

Selain Gerakan Canthelan, ada berbagai inovasi gerakan kemanusiaan yang muncul untuk membantu membangkitkan kembali perekonomian pada sektor-sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang luluh lantak karena pandemi Covid-19. Salah satu contohnya adalah sebuah Gerakan Kepedulian pada UMKM yang juga muncul di Yogyakarta. Gerakan yang dimotori oleh sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) diberi nama **Sambatan Jogja**, atau **Sonjo**. Apa itu Sonjo? Sonjo adalah gerakan kepedulian berbasis gotong royong yang diinisiasi para aktivis dosen UGM ketika melihat perekonomian masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang mayoritas bergantung pada

sektor pendidikan dan pariwisata lumpuh seketika akibat pandemi. Wisatawan dan mahasiswa yang merupakan penggerak utama perekonomian masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya tidak bisa lagi diandalkan akibat ditutupnya aktivitas semua kampus dan objek wisata di wilayah Yogyakarta.

Gerakan Sonjo muncul sebagai bentuk aksi solidaritas sekaligus mendorong kemandirian masyarakat untuk tidak hanya berpangku tangan dan hanya menunggu bantuan pemerintah saja. Sejak diluncurkan pada 24 Maret 2020, gerakan ini telah menghadirkan beragam program seperti Sonjo Pangan, Sonjo Husada, Sonjo Inovasi, termasuk Etalase Pasar Sonjo yang merupakan salah satu program dari Sonjo Pangan. Etalase Pasar Sonjo adalah aplikasi digital berupa katalog elektronik yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM. Aplikasi ini menjembatani para pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa mengoptimalkan penjualan melalui platform digital. Selama ini mayoritas UMKM yang tergabung dengan Sonjo bukan berasal dari kalangan melek teknologi dan memanfaatkan platform digital sebagai media promosi. Mereka sudah lama menjalankan transaksi jual beli secara fisik atau konvensional. Selama pandemi, aktivitas orang di luar rumah nyaris terhenti sehingga berpengaruh besar pada UMKM.

### **Epilog: Membangun Optimisme Bersama Melewati Pandemi**

Gerakan Sonjo dan Canthelan hanyalah contoh kecil dari gerakan kepedulian. Tentu banyak contoh gerakan lainnya yang hadir di tengah masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Keterlibatan berbagai pihak, lintas kalangan dan lintas generasi dalam bentuk gerakan berbasis *voluntary*, kesukarelaan, kepedulian, dan partisipatif sangat diperlukan untuk membantu pemerintah menangani dampak ekonomi akibat pandemi virus Corona. Kontribusi masyarakat dalam bentuk Gerakan Kepedulian berbasis Gotong-Royong menjadi modal sosial yang luar biasa untuk membangkitkan optimisme bahwa kita bisa bersama-sama melewati masa sulit akibat pandemi. Upaya kolektif semua elemen masyarakat diperlukan untuk menguatkan terwujudnya efektivitas dan mendukung keberhasilan berbagai program/kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang telah dirancang pemerintah.

# Menjamurnya Komunitas ASN Muda: *Being or Becoming*

Mutia Rizal,

Pegawai Tugas Belajar (S3 Universitas Gajah Mada) pada Biro SDM BPKP

Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti sebuah kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas Abdi Negara Muda, yang mengundang perwakilan dari komunitas Abdi Muda dan Aparatur Muda sebagai narasumbernya. Diskusi yang diberi nama ANM *Talk* ini bertajuk “ASN (Aparatur Sipil Negara) Muda Berkomunitas, Buat Apa?”

Bagi saya, diskusi ini menarik karena semuanya serba muda, baik atribut penamaan komunitas, para pesertanya, tampilan diskusi, dan juga isinya. Sebelumnya, saya pun mengamati ada banyak komunitas bermunculan di berbagai instansi pemerintah yang memiliki embel-embel ‘muda’. Sebut sebagai contoh, Kemenkeu Muda, BPKP Muda, DJKN Muda dan sebagainya masih banyak lagi.

Apa yang sebetulnya mereka cari dan perjuangkan?

Mengapa mereka perlu berkumpul? Mengapa ada istilah ‘muda’ di belakangnya? Ada apa dengan ASN tua?

## Pergolakan Identitas

Bagi saya, fenomena ini tidak biasa. Ada hal menarik yang perlu kita bedah, terutama terkait dengan sisi kultur (budaya). Dari kaca mata kultur, secara umum komunitas muda yang tumbuh subur tersebut bisa dikatakan sebagai pencarian identitas diri. Dalam diskusi tersebut, berbagai komunitas yang mulai muncul sejak tahun 2018 ini kompak mengatakan bahwa alasan mereka membuat komunitas karena adanya kegelisahan yang sulit terbendung dalam diri mereka. Kegelisahan yang pada awalnya hanya seputar ingin diakui perannya, sampai pada kegelisahan untuk mengubah sesuatu yang ada di sekeliling mereka.

Dua kegelisahan tersebut tentu saja merupakan suatu

yang wajar muncul di seputar birokrasi pemerintahan, yang sampai saat ini masih kuat bersemayam kultur paternalistik warisan feodal-kolonial. Dalam kultur tersebut, relasi patron-klien bersifat diametral, yakni dua hal yang saling berhadapan dan bersifat tidak setara. Katakanlah dua hal tersebut adalah ‘pimpinan-bawahan’, ‘atasan-anak buah’, ‘senior-junior’, dan ‘tua-muda’. Yang disebut pertama adalah barisan patron, sedangkan yang disebut kedua adalah barisan klien.

Patron selalu lebih *powerful* dibanding klien. Barisan patron selalu mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dibanding barisan klien. Barisan patron inilah yang selalu dianggap lebih benar, lebih paham, dan lebih dewasa dalam bertindak ataupun memutuskan sesuatu. Plus, barisan inilah yang menganggap dirinya memiliki tugas dalam membina dan bertanggung



jawab kepada barisan kliennya. Sementara, bagi barisan klien di masa kini, yang memang sebagian besar adalah para junior dan muda, seolah merasa tidak puas dengan kultur paternalistik yang melingkupinya. Mereka seolah merasa bahwa sudah saatnya relasi tidak lagi bersifat diametral. Mereka juga merasa bahwa pembinaan dan keputusan tidaklah selalu harus datang dari barisan pimpinan/senior. Apalagi jika mereka mulai mengingat sejarah proklamasi dan juga reformasi yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh barisan muda, maka jiwa-jiwa itu akan semakin bergelora.

Namun, apa mau dikata, lingkungan sekitar mereka saat ini belum lah mendukung sepenuhnya.

Alih-alih mendukung, justru sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa lingkungan di institusi masing-masing seolah mematikan gelora jiwa mereka. Itulah mengapa, mereka perlu berkumpul dan bercerita bersama untuk saling menguatkan di antara mereka. Mereka perlu bergabung merapatkan barisan agar identitas mereka tak lagi rapuh di depan barisan patronnya. Lebih jauh lagi, mereka berharap secara perlahan identitas mereka secara individu mampu diakui di institusi masing-masing. Lalu identitas apa yang sesungguhnya mereka cari, apakah menjadi (*being*) muda, atau menjadi (*becoming*) muda? Kedua istilah yang dalam bahasa Indonesia

sama-sama berarti ‘menjadi’ ini, memiliki makna yang berbeda. Adalah Heraclitus, Paramindes, dan juga Plato, sederetan filsuf Yunani yang mulai mempersoalkan hal ini, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh *culture studies*, di antaranya adalah Kathryn Woodward dan Stuart Hall. Secara umum, bagi para tokoh tersebut, *being* adalah suatu realitas yang tetap, yakni sebuah tahapan dalam kehidupan yang tidak akan terulang kembali. Sedangkan *becoming*, adalah sebuah realitas yang cenderung mengalir dan terus berubah. Bagi kehidupan manusia, *becoming* adalah proses pencarian diri yang tak pernah berhenti. Dalam konteks kultur, realitas tersebut dapat juga dipahami sebagai suatu identitas seseorang atau sekumpulan orang.

### **Menjadi (*Being*) Muda**

Dalam diskusi yang saya ikuti tersebut, para ASN muda ini merasa dirinya sebagai pegawai muda yang tidak bisa diam, selalu ingin berbuat sesuatu, dan penuh gagasan. Mereka terlihat ingin diakui di kantornya sebagai pegawai yang dapat diandalkan, yang tidak dipandang sebelah mata. Mereka menolak stigma tentang pegawai muda, atau yang sekarang banyak disebut sebagai pegawai milenial, yang seringkali dianggap bekerja semaunya, terburu-

buru, kurang sopan, dan juga sulit diatur. Mereka seperti ingin membuktikan sekalipun usia masih muda dan sulit diatur, tetapi mampu mengguncang dunia.

Perjuangan merebut identitas menjadi (*being*) muda ini ditandai dengan berkisarnya pembahasan dan permasalahan benturan nilai dalam *gap* antar generasi. Benturan nilai ini sangat dipengaruhi oleh adanya kultur dominan di birokrasi, yakni paternalistik tadi. Generasi muda (yang usianya masih muda) ingin membuktikan keberadaan dirinya di mata generasi seniornya. Sekali lagi bukan untuk menentang, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya ada dan diakui (eksis). Selain itu, mereka juga terlihat ingin menikmati masa mudanya yang hanya sekali, yang kenikmatan itu tidak bisa mereka dapati di lingkungan kantor. Bahkan, terkadang keberadaan penting mereka di kantor tak diakui tak mengapa, yang penting bisa bergabung bersama dalam komunitas. Itulah mengapa mereka juga bercerita bahwa saat mereka berkumpul, mereka merasa menemukan kembali semangatnya setelah terdemotivasi di kantor karena menjadi pegawai yang 'tak dianggap'.

Menjadi (*being*) muda sebetulnya lekat dengan sebuah perlawanan. Para

anak muda ini berupaya melawan stigma. Mereka juga terlihat melawan kultur dominan, yakni paternalistik. Mereka seperti ingin mendefinisikan diri mereka sendiri di sebuah waktu dan tempat tertentu. Apa yang selama ini mereka telah lakukan menunjukkan hal (perlawanan) tersebut.

Berbagai kegiatan digelar, semacam berkumpul dan berdiskusi bersama, menggelar seminar, kompetisi, dan juga *workshop*. Berbagai topik penting dan mutakhir pun dibawakan. Kegiatan-kegiatan itu pada dasarnya menunjukkan adanya sebuah perlawanan terhadap kultur paternalistik, yang selalu menganggap hanya yang seniorlah yang pantas berdiskusi secara serius dan mampu memahami permasalahan dengan baik. Saat narasumber berupa tokoh penting bersedia menghadiri acara mereka, seolah mereka merasa membayar 'lunas' atas anggapan anak muda belum pantas diperhitungkan.

Mereka seperti melawan, sambil mengatakan, "Kami juga paham, kami juga mampu, dan kami juga bisa berbuat sesuatu". Mereka juga seperti ingin berteriak, "Meskipun kami anak bawang yang belum memiliki kewenangan dan kedudukan, tapi gagasan kami penting didengar." Apa yang mereka lawan dan

buktikan adalah apa yang dianggap buruk oleh kultur dominan. Dengan demikian bisa juga dikatakan, perjuangan komunitas ASN menjadi (*being*) muda adalah berjuang untuk mendefinisikan identitasnya sendiri yang selama ini telah secara tetap ditentukan oleh kultur dominan. Mereka mendefinisikan dirinya di tengah kultur dominan yang tak mampu mereka lawan.

### **Menjadi (*Becoming*) Muda**

Berbeda dengan menjadi (*being*) muda, yang identitasnya cenderung melekat tetap, perjuangan untuk merebut identitas menjadi (*becoming*) muda lebih menekankan pada proses perubahan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan gaya ataupun karakter yang ada pada diri anak muda, melainkan perubahan dalam mendefinisikan siapa dirinya. Proses mendefinisikan siapa dirinya adalah proses yang



Foto  
Septian Agam

selalu bergerak mengikuti kondisi di luar dirinya. ASN muda tidak seyogyanya hanya berhenti pada identitas yang lincah, gaul, semangat, kreatif, dan produktif. ASN muda hendaknya lebih mampu melakukan negosiasi dengan kondisi tertentu yang membawa konsekuensi pada berubahnya identitas murni dirinya.

Beberapa pihak dalam diskusi di atas mengatakan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh komunitas ASN muda adalah nilai-nilai yang egaliter, inklusif, dan fleksibel. Nilai-nilai inilah yang dapat menjadi modal bagi ASN muda untuk berproses menjadi (*becoming*) muda. Melalui nilai-nilai itulah identitas mereka dapat berubah dalam rangka bernegosiasi dengan kondisi di birokrasi.

Dalam proses *becoming*, yang lebih dipentingkan adalah bagaimana perubahan definisi atas dirinya mampu mempengaruhi kultur dominan yang kini melingkupinya. Pada saat sekumpulan ASN muda mulai berpikiran hal tersebut, maka komunitas tidak lagi berkatut pada kegelisahan tentang pengakuan karakter mudanya. Komunitas mulai bergerak untuk sebuah perubahan yang nyata. Mereka tak akan lagi takut pada dualitas senior-junior, karena mereka telah mampu

melakukan negosiasi untuk mengatasinya. Terkadang mereka harus diam seribu basa saat menghadapi tekanan di kantornya. Hal itu membuat identitasnya berubah menjadi anak muda yang diam seperti patung, bukan pemuda yang lincah lagi. Terkadang mereka perlu berkamuflase seperti bunglon untuk menghadapi situasi yang tidak menentu di kantornya. Mereka perlu berbaju cokelat saat semua orang disekelilingnya juga berbaju cokelat agar dirinya dapat berbaur dengan seniornya, tetapi mereka tak akan melupakan tugas utamanya untuk menangkap mangsa, alias melakukan perubahan nyata di birokrasi.

Dengan demikian, perjuangan untuk menjadi (*becoming*) muda tak akan lekang oleh waktu dan tempat tertentu. Perjuangannya juga tak akan berhenti saat usianya tak lagi muda. Identitasnya terus berubah, sedangkan yang tetap adalah tujuannya. Perjuangan dilakukan terus menerus untuk dapat diakui dan sejajar dengan pegawai senior lainnya. Kemudaannya tidak lagi diukur dari usia, melainkan dari cara berpikir dan gagasan segarnya. Artinya, dalam komunitas, mereka perlu saling mendukung dan menguatkan untuk mampu mendapatkan tempat terhormat di antara

para seniornya. Dalam kondisi demikian, tidak lagi ada permasalahan senior-junior, melainkan mampu-tidak mampu dan pantas-tidak pantas.

Sebuah proses menjadi (*becoming*) yang dimainkan oleh pegawai muda memang bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka harus mampu menunjukkan kapasitas dan kemampuan yang lebih untuk kemudian dapat menerobos barisan patronnya. Dengan demikian, pergerakan komunitas menjadi (*becoming*) muda tidak lagi mempermasalahakan *gap* antargenerasi dari segi usia, tetapi pergerakan komunitas lebih menitikberatkan perannya untuk meremajakan wajah birokrasi yang semakin keriput.

### Epilog

Meskipun tujuan dan caranya berbeda, akan tetapi baik *being* maupun *becoming*, keduanya adalah sebuah perjuangan meraih identitas diri ‘menjadi muda’. Berbagai komunitas ASN muda yang kini semakin marak kemunculannya perlu memperhatikan hal tersebut dengan baik. Hal itu diperlukan agar pergerakan komunitas tidak berhenti pada proses ‘*being*’ semata, tetapi mampu berproses untuk menjadi (*becoming*) muda, semuda-mudanya, se hormat-hormatnya.



# INDONESIA

## Jadi Rujukan Kesuksesan Program Inklusi Keuangan

**Daniel Wawone,**  
Auditor pada Biro Sumber Daya Manusia BPKP

**S**alah satu faktor yang mendukung keberhasilan program inklusi keuangan di Indonesia adalah kegiatan keuangan mikro (*microfinance*). Hal tersebut disampaikan oleh Jay K. Rosengard, dosen dan peneliti pada Harvard Kennedy School, Harvard University, dalam paparannya yang berjudul *Financial Inclusion* pada acara Sibos 2014, merujuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank tersukses dan terbesar di dunia dalam hal bisnis keuangan mikro. Kesuksesan BRI terkait dengan *microfinance* berimbas pada peningkatan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Jay memaparkan keberhasilan BRI (secara khusus) dan Indonesia (secara umum) tidak hanya pada konferensi dan forum internasional saja. Pria yang fasih berbahasa Indonesia ini bahkan dalam kelas intensifnya, memiliki sesi tersendiri yang membahas secara detail mengenai kesuksesan Indonesia dalam menerapkan program inklusi keuangan melalui *microfinance*.

### Mengapa inklusi keuangan penting?

Animo pemerintah dunia terhadap penerapan program inklusi keuangan

terjadi setelah krisis keuangan global 2008. Saat itu, masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan tidak pernah menggunakan jasa keuangan perbankan berjumlah sangat besar, terutama untuk wilayah negara berkembang dan negara miskin. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 20% dari populasi penduduk Indonesia (di atas 15 tahun) yang dapat mengakses jasa keuangan perbankan di tahun 2011. Padahal akses terhadap jasa keuangan perbankan dapat memberikan manfaat yang cukup banyak kepada individu dan masyarakat, baik mereka yang berpenghasilan rendah maupun tinggi.

Misalnya, individu yang memiliki akses terhadap jasa tabungan bank akan memungkinkan individu tersebut untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk pembiayaan hal-hal yang bersifat darurat di kemudian hari (*smoothing the consumption*). Berikutnya, oleh pihak bank, dana yang terkumpul dari masyarakat dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok lainnya untuk pembiayaan usaha. Peningkatan jumlah usaha akan menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Tujuan akhir yang diharapkan dari program inklusi keuangan adalah pengurangan jumlah masyarakat miskin.

### Inklusi Keuangan di Indonesia

Perjalanan inklusi keuangan di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2012. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menggandeng



bank-bank komersil dan menjalankan program *branchless banking* untuk menjangkau masyarakat yang dikategorikan sebagai *unbanked* di seluruh Indonesia. *Branchless banking* merupakan program yang melibatkan agen bank, yaitu jasa pihak ketiga, untuk menawarkan produk perbankan yang sederhana. Kemudian program ini dikembangkan lagi menjadi Laku Pandai, atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif. Program lainnya yang dijalankan pemerintah untuk mendukung inklusi keuangan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang juga turut mengikutsertakan bank-bank besar, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Upaya kerja sama dengan BRI dilakukan atas dasar BRI merupakan salah satu bank komersil yang berhasil mengembangkan lini keuangan mikro menjadi bisnis yang menguntungkan.

Berkat kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, bank dan lembaga keuangan lainnya, Indonesia berhasil meningkatkan indeks inklusi keuangan menjadi 76,19% dan literasi keuangan 38,03%. Pada tahun 2013, indeks inklusi keuangan Indonesia adalah 59,74%, dan indeks literasi keuangan Indonesia 21,84%. Data tersebut diambil dari hasil survei OJK 2019 dengan 12.733 responden pada 34 provinsi di Indonesia. Indeks literasi keuangan yang digunakan menggunakan parameter: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sedangkan indeks inklusi keuangan hanya menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

**Grafik 1**

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019

### Benarkah iliterasi keuangan penyebab kemiskinan?

Terdapat sejumlah besar penelitian dan tulisan yang mengaitkan antara inklusi keuangan, literasi keuangan, dan kemiskinan. Anggapan pada umumnya adalah jumlah masyarakat miskin memiliki asosiasi negatif dengan jumlah masyarakat yang memiliki literasi keuangan dan yang dapat mengakses layanan keuangan. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dianggap tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keuangan yang membuat mereka tidak dapat mengakses layanan keuangan. Pemberi kebijakan biasanya menyetujui anggapan ini, dan mengeluarkan kebijakan edukasi keuangan.

Dari sisi layanan pembiayaan, menurut anggapan ini, apabila masyarakat memiliki pemahaman tentang berbagai jenis layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan (tingkat literasi keuangan yang tinggi), masyarakat (miskin) akan memiliki upaya untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak bank/ lembaga keuangan lainnya, yang akan membantu mereka dalam membuat/mengembangkan usaha. Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat miskin ini dapat mengajukan pembiayaan apabila syarat utamanya adalah membuka rekening tabungan, yang mana biasanya saldo minimum yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening tabungan masih dirasa berat oleh masyarakat miskin? Adapun

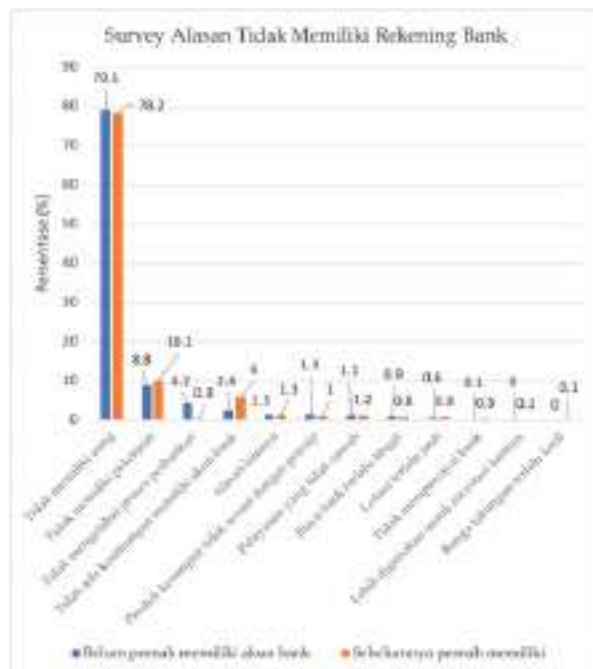
jika mereka telah memiliki rekening pada bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman, biasanya syarat pengajuan pembiayaan berikutnya adalah adanya *collateral*/jaminan. Bagaimana masyarakat miskin dapat mengajukan pembiayaan apabila mereka tidak memiliki jaminan yang memadai? Perlu diperhatikan bahwa masyarakat miskin biasanya bukan hanya tidak memiliki penghasilan yang cukup, namun juga tidak memiliki barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan bank. Dari sisi layanan pembiayaan ini, dapat terlihat bahwa rendahnya inklusi keuangan apakah sesungguhnya disebabkan oleh illiterasi keuangan atau kebijakan bank/lembaga keuangan yang mengecualikan golongan masyarakat tertentu?

Dari sisi layanan pendanaan (*investment*), terdapat anggapan bahwa edukasi keuangan kepada masyarakat miskin adalah untuk menjelaskan produk-produk investasi dalam rangka meningkatkan penghasilan mereka. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat miskin ini dapat berinvestasi apabila konsumsi (C) mereka melebihi pendapatan (Y) yang mereka terima ( $C > Y$ ), atau konsumsi mereka sama dengan pendapatan yang mereka terima ( $C = Y$ ), sehingga mereka tidak memiliki selisih lebih atau tabungan,  $S (= Y - C)$ , yang dapat digunakan untuk investasi? Jadi dari sisi layanan pendanaan ini, apakah rendahnya inklusi keuangan sesungguhnya karena masyarakat miskin tidak

memiliki pemahaman yang memadai tentang keuangan (*financially illiterate*) atau karena tidak memiliki sumber daya (*resources*) yang memadai?

Sebagai contoh, dengan hasil survey 3.360 responden masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 menemukan bahwa banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki rekening bank tidak didominasi dengan alasan: “masyarakat tidak mengetahui tentang layanan perbankan/keuangan (*finance illiteracy*)”, melainkan karena masyarakat tersebut tidak memiliki uang (79.1% responden yang belum pernah memiliki rekening bank, dan 78.2% responden yang sebelumnya pernah memiliki rekening bank memilih alasan ini, lihat Grafik 2).

Rosengard mengatakan bahwa yang menjadi elemen penting dari inklusi keuangan bukanlah literasi keuangan, melainkan *consumer protection*. Pihak berwenang seharusnya mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, dan dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa terdapat *fairness* dalam layanan keuangan yang



Grafik 2

Sumber: Laporan Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Belanda Tahun 2009, "Improving Access to Financial Services in Indonesia".

ditawarkan kepada masyarakat. Misalnya, ketika pihak bank memberikan pinjaman kepada pelanggannya, apakah bank dan lembaga keuangan lainnya membuka kesempatan pinjaman kepada seluruh masyarakat? Lalu, apakah biaya bunga yang diberikan sudah wajar? Atau ketika masyarakat akan menanamkan dananya di bank atau lembaga keuangan lainnya (contohnya untuk tabungan, investasi, jaminan hari tua, atau perjalanan haji), apakah pihak berwenang telah memberikan jaminan yang memadai bahwa simpanan dana masyarakat tersebut aman?

Dalam kelas intensifnya, *BRI - the largest and probably the least known micro banking program in the world*, Rosengard menggunakan BRI sebagai *role model* kesuksesan pengelolaan *microfinance*, yang pada akhirnya mendorong program inklusi keuangan di Indonesia. Lini bisnis keuangan mikro BRI bukan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), melainkan salah satu lini dalam bisnis keuangan BRI yang selalu menghasilkan keuntungan. Menurut Rosengard, kesalahan utama bank-bank pada umumnya menderita kegagalan dalam lini keuangan mikronya adalah karena bank-bank tersebut memperlakukan pembiayaan mikro sebagai pembiayaan besar pada umumnya, sehingga bank-bank tersebut gagal dalam melihat bentuk dan karakteristik bisnis mikro yang berbeda dari bisnis besar pada umumnya.

Sebagai contoh, BRI memperlakukan bisnis mikro bukan sebagai bisnis besar, sehingga kriteria pembiayaan bisnis mikro tersebut berbeda dengan bisnis besar. Dalam hal pembiayaan, pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar diminta untuk memberikan jaminan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (Bangunan dan Tanah) atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atau bentuk aset-aset perusahaan yang tergolong besar. Hal ini sangat berbeda dengan bisnis mikro, yang mana biasanya mereka tidak memiliki aset yang bernilai tersebut. Untuk jaminan pembiayaan pada bisnis mikro, BRI biasanya memperkenankan barang-barang kerja usaha mikro, misalnya seperti cangkul, *mini tractor*, alat yang digunakan untuk membatik, dan lain sebagainya. Dengan demikian,

usaha mikro dan masyarakat kecil tersebut dapat mengakses layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank.

Contoh-contoh lain dari BRI yang disampaikan Rosengard adalah terkait dengan kemudahan akses BRI, yang mana BRI memiliki agen BRI Link sebagai upaya untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari pusat kota, dan Teras BRI, sebagai upaya ‘jemput bola’ layanan perbankan ke masyarakat di lokasi-lokasi bisnis, seperti pasar tradisional, terminal, dan ruko-ruko.

Pada intinya, Rosengard hanya menekankan bahwa untuk menjamin keberhasilan program inklusi keuangan melalui *microfinance*, para pembuat kebijakan harus mengetahui karakteristik masyarakat sasarannya, apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, yang dapat memperbesar peluang mereka untuk berusaha. Kemudian, seluruh pihak juga memiliki peran dalam mendukung keberhasilan program inklusi keuangan secara umum dan *microfinance* secara khusus. Program *microfinance* BRI, tidak akan berjalan lancar dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia apabila tidak memperoleh dukungan dari pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, Rosengard mengatakan bahwa bank dan lembaga keuangan dapat memiliki prinsip “*do well and do good*”; program *microfinance* yang akan membantu masyarakat kecil, dapat menjadi bisnis yang menguntungkan bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, contoh BRI - Indonesia.

# JADI AUDITOR BERDAYA SAING GLOBAL DENGAN CIA

Ayu Isni Arum



Ilustrasi  
Diana Pertiwi

**D**orongan globalisasi, perkembangan teknologi, ekonomi makro, situasi geopolitik, dan faktor lainnya mendorong organisasi harus mampu adaptif. Agar selaras mengikuti ritme dinamika lingkungan, auditor internal harus berpikir keras sehingga mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan berdaya saing di pasar tenaga kerja global. Berbagai upaya ekstra harus dilakukan, salah satunya dengan mengelola aset berharga miliknya, yaitu aset intelektual.

Sama halnya dengan auditor intern di sektor privat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun harus memiliki kapabilitas berkelas dunia mengingat perannya sebagai pemberi *insight* dan *foresight* bagi pemerintah dalam menghadapi

risiko-risiko global. Terlebih, seperti saat ini ketika pemerintah harus bertahan di masa-masa sulit pandemi Covid-19. Nah, di rubrik Sertifikasi kali ini, Penulis mengulas peningkatan kompetensi yang dapat membekali APIP *to the next level*, yaitu *Certified Internal Auditor* (CIA).

Tahun 2018 lalu, pemegang sertifikasi CIA di Indonesia terbilang minim, yaitu kurang dari 500 orang. Pasalnya, ujian CIA dinilai sangat ‘menantang’, baik secara substansi materi maupun bahasa. Selain karena menggunakan bahasa asing, biaya sertifikasi ini pun cukup mahal. Tapi, jangan berkecil hati dulu, simak rubrik ini sampai tuntas ya.

Sertifikasi CIA memiliki cakupan yang luas. Jadi cocok banget untuk auditor internal yang ingin memahami seluk beluk profesinya. Auditor yang memiliki kompetensi ini, saat dihadapkan pada problematika di lapangan, akan mampu menganalisis dari sudut keilmuan yang luas dan memiliki kecakapan dalam mengaplikasikan keilmuannya tersebut secara profesional.

Keuntungan lain yang didapatkan dari sertifikasi ini adalah CIA merupakan satu-satunya sertifikasi audit internal yang telah diakui secara global. Oleh karena itu, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai penyelenggara CIA terus mendorong agar auditor internal Indonesia mendapatkan kredensial audit internal profesional melalui CIA agar memiliki daya saing di kancah dunia.

Untuk memperoleh gelar CIA, para kandidat harus mampu menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada tiga bagian ujian dalam jangka waktu tiga tahun sejak pendaftaran ujiannya dinyatakan efektif. Artinya, jika ada salah satu yang tidak terselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, kandidat harus mengulang prosesnya dari awal lagi.

Materi ujian bagian pertama bertema *Essentials of Internal Auditing* berjumlah 125 soal yang mencakup enam fokus materi yaitu *Foundations of Internal Auditing; Independence and Objectivity; Proficiency and Due Professional Care; Quality Assurance and Improvement Program; Governance, Risk Management, and Control; dan Fraud Risk*. Kandidat harus menyelesaikan ujian tersebut dalam 180 menit. Selanjutnya, materi ujian bagian kedua bertema *Practice of Internal Auditing*. Kandidat harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 120 menit. Bagian ini mencakup empat topik, yaitu *Managing Internal Audit Activity, Planning The Engagement, Performing The Engagement, dan Communicating Engagement Result and Monitoring Progress*. Terakhir, pada materi ujian bagian ketiga bertema *Business Knowledge for Internal Auditor*, mencakup empat topik, yaitu *Business*

*Acumen, Information Security, Information Technology, dan Financial Management*. Atas 100 soal di bagian ini, kandidat harus menyelesaikannya dalam waktu 120 menit.

Ujian CIA dilaksanakan secara *computer based test* (CBT) di beberapa lokasi. Untuk wilayah Jakarta, lokasi ujian bertempat di Pearson VUE yang salah satunya berada di Kampus Universitas Indonesia, Salemba. Kabar baiknya, untuk mengatasi kendala bahasa, IIA mengakomodasi pelaksanaan ujian dalam bahasa Indonesia. Kandidat yang memilih ujian dalam bahasa Indonesia juga dapat mengakses pertanyaan aslinya dalam bahasa Inggris. Di samping itu, IIA juga menawarkan kemudahan bagi pemegang aktif sertifikasi *Certification in Control Self-Assessment* (CCSA), *Certified Financial Services Auditor* (CFSA), dan *Certified Government Auditor Professional* (CGAP) dalam proses mendapatkan sertifikasi CIA melalui *CIA Specialty Challenge Exam*. Melalui jalur ini, IIA berupaya menjembatani berbagai spesialisasi dalam Silabus Ujian CIA 2019.

Untuk meningkatkan peluang lulus sertifikasi, konsisten belajar dan berlatih adalah kuncinya. Nah, IIA memiliki program *CIA Review Course* menggunakan materi *The IIA's New CIA Learning System* yang telah dikembangkan untuk membantu kandidat memahami dan berlatih ujian. Program ini dikemas dalam format *blended learning* dengan *workbooks* dan *web-based learning software*. Para kandidat yang mengikuti program ini, akan didampingi oleh instruktur berpengalaman dalam mempelajari seluruh *CIA Exam Syllabus* secara terstruktur dan interaktif. Mau ikutan, tapi nyari potongan? Ikuti terus perkembangan informasi CIA ini di laman IIA. Tak jarang IIA memberikan promo dan penawaran keikutsertaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Contohnya di tahun 2018 lalu, IIA memberikan pembebasan biaya aplikasi untuk mengikuti ujian CIA bagi para internal auditor di Indonesia yang mendaftar pada tanggal 22-26 November 2018 dengan pengantar Bahasa Indonesia. Tak tanggung-tanggung, IIA Indonesia memberi keringanan biaya *membership* hingga 50 persen bagi calon kandidat yang mendaftar pada periode tersebut. Menarik bukan?

**Pertanyaan:**

Kami telah mendaftarkan dua peserta untuk Diklat Penjenjangan Auditor Madya melalui registrasi *online* dengan status tercatat. Mohon info selanjutnya, langkah-langkah apa yang perlu kami ambil?

**Inspektorat Pohuwato, Gorontalo**

**Jawaban:**

Setelah admin dari instansi mendaftarkan peserta melalui registrasi *online*, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) akan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan peserta. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon peserta diklat penjenjangan auditor madya, di antaranya:

- memiliki sertifikat lulus Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Muda;
- memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I/golongan ruang III d;
- Auditor Muda yang sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 350 angka kredit;
- diusulkan oleh kepala/pimpinan unit organisasi yang bersangkutan

Apabila setelah diverifikasi terdapat persyaratan yang kurang/tidak terpenuhi, akan ada perubahan status menjadi tidak memenuhi syarat. Untuk itu, admin perlu memonitor status tersebut, dan segera melengkapi kekurangan persyaratan seperti yang disebutkan oleh verifikaturnya. Setelah admin melengkapi kekurangan berkasnya, verifikatur akan melakukan pengecekan kembali.

Namun, apabila setelah diverifikasi semua persyaratan terpenuhi, maka status dalam registrasi *online* akan menjadi diverifikasi dan selanjutnya akan ada proses penetapan menjadi peserta diklat. Pihak Pusdiklatwas akan melakukan konfirmasi mengikuti diklat ke peserta diklat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Pusbin JFA. Terima Kasih

**Salam,  
Kapusdiklatwas, Sally Salamah**

**Pertanyaan:**

Kami akan mengikuti diklat JFA bulan Agustus 2020 untuk Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Namun, saat kami mencoba mendaftar dan masuk kelas bulan agustus di registrasi online, tidak bisa dilakukan. Izin menanyakan terkait hal tersebut.

**Pusat Kesehatan Angkatan Darat**

**Jawaban:**

Langkah-langkah pendaftaran diklat JFA:

1. Pendaftaran peserta diklat auditor dilakukan oleh admin unit instansi pendaftar di laman <http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi/>
2. Pilih menu diklat fungsional auditor, dan daftar sesuai dengan pengelompokannya sebagai berikut:
3. Kode (0216) untuk pendaftaran peserta Diklat Pembentukan Auditor Terampil PNBP
  - Kode (0217) untuk pendaftaran peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli PNBP
  - Kode (0218) untuk pendaftaran peserta Diklat Penjenjangan Auditor Muda PNBP
  - Kode (0219) untuk pendaftaran peserta Diklat Penjenjangan Auditor Madya PNBP
  - Kode (0220) untuk pendaftaran peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama PNBP
4. Upload dokumen-dokumen persyaratan yang diminta seperti surat usulan, SK pangkat dan jabatan, ijazah, sertifikat lulus jenjang sebelumnya dan penilaian angka kredit (untuk diklat penjenjangan).
5. Verifikasi dan penetapan peserta oleh Pusbin JFA berdasarkan urutan antrian pendaftar.

**Salam,  
Kapusdiklatwas, Sally Salamah**

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Pak Edi Mulia dan Bu Sally Salamah. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke [wartapengawasan@gmail.com](mailto:wartapengawasan@gmail.com) atau redaksi **Warta Pengawasan**.

# MENDUNIA DENGAN TEKNOLOGI PAKAN IKAN

*Gibran Huzaifah*



“Orang lain (karyawan eFishery) saja bisa mempercayai saya, masa saya menyerah?!” Kalimat sakti ini diucapkan oleh *Founder* sekaligus CEO eFishery Gibran Huzaifah saat menceritakan pengalamannya jatuh bangun ‘membesarkan’ eFishery, perusahaan *aquaculture intelligence* yang kini telah sukses menjangkau lebih dari 180 kota di 24 provinsi, serta melayani ribuan pembudidaya ikan dan udang di seluruh Indonesia. Pembaca, sebelum menyelami kisah inspiratif Gibran lebih dalam lagi, *yuk* kita berkenalan dulu dengan eFishery.

Didirikan pada 2013, eFishery adalah perusahaan *aquaculture intelligence* pertama yang mengembangkan inovasi di bidang akuakultur. Visinya adalah membangun ekosistem akuakultur di Indonesia, yang tidak hanya menguntungkan seluruh *stakeholders*, tetapi juga berkelanjutan bagi pembudidaya ikan dan udang di Indonesia.

Melalui empat produk utamanya, eFishery ingin turut mengatasi permasalahan pangan melalui akuakultur, mengatasi masalah mendasar dalam industri akuakultur dengan menyediakan teknologi yang terjangkau, serta mengurangi ketimpangan sosial dan



Ilustrasi  
Diana Pertiwi

ekonomi melalui ekonomi digital yang inklusif.

*Beautiful thing takes time.* Di balik cerita kesuksesan eFishery, ada keringat seorang anak muda dari keluarga sederhana bernama Gibran Huzaifah yang pernah gagal, rugi, hingga kehabisan modal, namun berani bangkit dan mengambil keputusan besar di usianya yang baru menginjak kepala dua.

Saat ini, Gibran telah menjadi *entrepreneur* muda dan sukses yang diakui kiprahnya di kancah nasional maupun internasional. Berbagai penghargaan begengsi telah ia kantongi, seperti Forbes 30 Under 30 Asia. Selain itu, eFishery sendiri di tahun 2014 berhasil menjuarai *Get in The Ring Global Startup Competition*, yakni ajang internasional bagi *startup-startup* untuk memperebutkan investasi senilai 1 juta Euro setiap tahunnya.

Nah, di sela-sela kesibukannya, Gibran

berkesempatan untuk membagikan pengalamannya selama berkecimpung di dunia akuakultur. Penasaran? Yuk, kita simak cerita inspiratifnya!

### Apa yang menginspirasi untuk mengembangkan eFishery? Adakah gambaran prospeknya ke depan?

Ketika belajar mata kuliah Akuakultur, saya mendapat kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan usaha budidaya ikan. Pada saat itu, dosen saya mengatakan bahwa suatu hari nanti ikan lele akan jadi *the next big thing*. Saya, yang pada saat itu kurang berkecukupan secara finansial, terinspirasi oleh ucapan dosen saya tersebut dan memutuskan untuk memulai budi daya lele untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketika menjalani usaha ini, saya menyadari bahwa pakan ikan mengambil porsi yang cukup besar, hingga mencapai 70-80 persen dari total biaya produksi. Saya

juga mengamati, ternyata pemberian pakan secara manual dengan tangan yang banyak dilakukan oleh pembudidaya itu kurang efektif dan efisien karena pakan ikan tidak tersebar secara merata. Selain itu, banyak pakan yang terendam air sehingga nutrisinya banyak yang hilang dan menciptakan masalah baru yaitu pencemaran badan air. Berangkat dari situlah, saya berpikir untuk mencari solusinya, agar semua orang dapat memperoleh akses terhadap produk perikanan, yang notabene menjadi sumber pangan kaya nutrisi, dengan harga terjangkau dan melalui pembudidayaan yang ramah lingkungan.

Kemudian saya melakukan riset dan menyadari bahwa ada *market* yang besar untuk industri akuakultur ini. Di momen tersebut, saya bertemu dengan Chrisna, *co-founder* eFishery. Kami memiliki kesamaan visi, dan akhirnya kami bersama-sama mendirikan eFishery.

### Siapa saja konsumen produk eFishery ini? Apakah ada pertimbangan prioritas tertentu dalam melayani konsumen dalam/ luar negeri?

Terdapat lebih dari 30 juta kolam dan 3,3 juta pembudidaya, baik ikan

maupun udang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk eFishery telah mendukung puluhan ribu kolam ikan di lebih dari 180 kota, yang berpusat di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Kami yakin bahwa produk kami akan cocok untuk berbagai jenis lingkungan budi daya ikan baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di Bangladesh, Thailand, dan Vietnam. Namun demikian, kami memutuskan, fokus utama kami di tahun 2020 ini adalah memperkuat operasi inti kami dan memberikan hasil terbaik bagi pembudidaya di Indonesia. Kami berharap dapat mengamankan posisi kami di Indonesia dengan meningkatkan produk kami dan menciptakan kolaborasi yang lebih strategis. Setelah kami membangun model yang kuat dan dapat direplikasi di seluruh Indonesia, kami akan siap untuk mengeksplorasi kesempatan untuk ekspansi secara regional.

**Bagaimana potensi dan tantangan usaha di bidang akuakultur di Indonesia, khususnya di masa pandemi ini? Bagaimana eFishery memitigasi risiko-risiko yang ada?**

Penguatan rantai pasokan makanan di Indonesia, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor global, sangat penting saat ini. Selama masa pandemi ini, kinerja bisnis kami

tidak terpengaruh secara signifikan karena kami berada pada *essential vertical*. Data juga menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan selama masa pandemi ini cenderung naik, karena semakin banyak masyarakat *aware* terhadap kesehatan dan mencari makanan dengan nutrisi tinggi.

**Apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari para pelaku usaha perikanan yang bermitra dengan eFishery? Adakah program/produk baru yang membantu mitra mengatasi kesulitannya di masa pandemi?**

Pembudidaya yang menjadi mitra eFishery akan memperoleh manfaat melalui empat produk utama eFishery, seperti:

1. Pemberian pakan berlebih merupakan masalah signifikan bagi banyak pembudidaya karena pakan akan terbuang sia-sia dan berpotensi mengakibatkan pencemaran air. Dengan eFisheryFeeder, perangkat pintar yang dapat memberi pakan secara otomatis (*autofeeder*) sekaligus meningkatkan mutu dan hasil panen ikan, pembudidaya dapat memastikan ikan mereka telah diberi makan secara optimal.
2. Pakan ikan menjadi komponen besar (sekitar 80 persen) dari biaya produksi. Untuk membantu para



pembudidaya mengelola biaya mereka, eFishery bekerja sama dengan berbagai merek pakan ikan dan udang untuk memastikan distribusi pakan yang lebih mudah dan harga pakan yang kompetitif.

3. Sebagai pekerja sektor informal, pembudidaya seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. eFisheryFund menghubungkan pembudidaya ikan secara langsung dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendanaan. Komponen utama eFisheryFund adalah eFisheryKabayan (Kasih, Bayar Nanti atau bisa disebut *PayLater*), yaitu *platform online* yang menyediakan pembiayaan untuk mendapatkan produk-produk eFishery. Pembudidaya mengajukan pinjaman melalui *platform*



digital yang kemudian diproses oleh eFishery. Pembudidaya yang lolos verifikasi dari eFishery akan menerima pinjaman dari mitra layanan finansial yang diwujudkan dalam bentuk produk-produk eFishery.

4. Ketika pembudidaya berhasil meningkatkan hasil panen, mereka membutuhkan pasar yang lebih luas untuk menjual produk mereka. Melalui eFisheryFresh pembudidaya dapat terhubung secara langsung dengan pembeli (pedagang maupun konsumen akhir). Hal ini akan meningkatkan transparansi harga dan visibilitas permintaan pasar, sehingga pendapatan pembudidaya akan meningkat dan pembeli dapat menghemat biaya. Selain itu, pemanfaatan eFisheryFresh juga menguntungkan bagi

pembeli karena mereka dapat memperoleh produk premium dengan harga terbaik yang kualitas dan kontinuitasnya terjaga.

Data yang dihasilkan dari eFisheryFeeder juga memungkinkan pembudidaya untuk memprediksi volume hasil panen. Dengan demikian, pedagang dapat melakukan pemesanan sebelumnya (*pre-order*) melalui eFisheryFresh untuk memastikan bahwa pasokan yang mereka miliki selalu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Saat ini, ratusan pembudidaya ikan telah didukung oleh eFisheryFresh dan ribuan pembeli, baik B2B maupun B2C, telah bertransaksi melalui eFisheryFresh.

**Sebagai Founder dan CEO eFishery, Gibran terbilang muda dan sukses. Sebelumnya, apakah pernah gagal Ketika menjalani usaha ini? Apa motivasi yang membuat Gibran kemudian memilih bangkit dan bertahan?**

Sewaktu memulai usaha budidaya lele, saya banyak mengalami kegagalan dan kerugian. Pada waktu awal membangun eFishery pun saya pernah kehabisan dana, karena pada saat itu kami belum mendapatkan suntikan dana dari investor. Waktu itu saya berkata kepada semua karyawan bahwa saya tidak mampu

untuk membayar gaji mereka. Saya beri mereka pilihan, jika masih ingin tetap di eFishery silakan datang kembali besok, jika tidak, ya tidak apa apa, karena saya juga tidak bisa memenuhi hak mereka. Ternyata, keesokan harinya karyawan tetap kembali bekerja dan itulah yang membuat saya bertahan. Orang lain saja bisa mempercayai saya, masa saya menyerah?!

**Adakah harapan dan motivasi untuk para pelaku usaha perikanan di Indonesia?**

Indonesia merupakan produsen produk akuakultur terbesar kedua di dunia, setelah Cina. Selain itu, akuakultur sendiri merupakan sektor pangan yang pertumbuhannya paling cepat di antara yang lain. Potensi di sektor akuakultur ini sangat besar, namun potensi ini baru bisa secara efektif didayagunakan jika seluruh *stakeholders* bersamasama membangun sektor ini. Para pembudidaya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi *startups* yang menciptakan inovasi untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas hasil budidaya. Pemerintah pun diharapkan dapat mendukung keberlanjutan ekosistem sektor akuakultur ini.

(Ayu Isnı Arum)

# DENGARLAH NYANYIAN ANGIN

*oleh Haruki Murakami*



*“Tidak ada kalimat yang sempurna.  
Sama seperti tidak ada keputusan  
yang sempurna”*



**I**ni adalah kalimat pembuka dari novel pertama Haruki Murakami yang memenangkan Gunzo Literary Award tahun 1979. “Dengarlah Nyanyian Angin” dengan ringan bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan modern di Jepang tahun 1960-1970-an. Ia berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang antikemapanaan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan.

Mengambil latar belakang musim panas di tahun 1970-an, tokoh ‘Aku’ dalam buku ini adalah seorang pemuda yang biasa saja. Seorang mahasiswa jurusan Biologi yang memiliki hubungan cinta dan benci dengan kegiatan tulis menulis, serta terobsesi pada pengarang Amerika tidak terkenal yang mati bunuh diri bernama Derek Heartfield. ‘Aku’ bersahabat dengan Nezumi,

seorang anak dari keluarga kaya, tapi membenci orang kaya. Nezumi mengaku tak suka membaca buku, namun melahap karya-karya Henry James sampai Kazantzakis, dan bercita-cita untuk menulis novel.

Cerita bergulir tentang keseharian ‘Aku’ yang menghabiskan liburan musim panas di kota kelahirannya. ‘Aku’ kemudian berkenalan dan bersahabat dengan Nezumi, serta menemukan gadis tambatan hati. Buku ini dipenuhi percakapan-percakapan mereka tentang hidup, cinta, dan sastra diselingi dengan nostalgia masa lalu ‘Aku’. Mereka bertiga melewati delapan belas hari yang tak terlupakan di sebuah kota kecil di tepi laut.

Dalam perkenalannya dengan Nezumi, cerita mengambil latar di dalam mobil Fiat hitam 600 milik Nezumi yang melaju

dengan kecepatan tinggi. Mabuk, mereka menabrak dan memporak-porandakan pagar tanaman dan halaman penuh bunga azalea. Meski mobil Nezumi ringsek, untungnya mereka berdua selamat. Terduduk di atas kap mobil sesaat setelah hampir mati, mereka pun melanjutkan perkenalan itu tanpa merasa ada yang perlu dikhawatirkan dan kembali menenggak bir di bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kecelakaan. Peristiwa itu membuat hubungan pertemanan mereka semakin solid.

Beralih ke hubungan ‘Aku’ dan pacarnya, suatu hari gadis ini memberitahukan kalau dia akan berpergian. Namun, beberapa lama kemudian gadis ini mengakui bahwa dia sebenarnya tidak berpergian, melainkan menjalani aborsi atas janin yang dia sendiri tak ingat siapa ayahnya. Hal itu membuatnya butuh waktu untuk berpisah dengan ‘Aku’.

Harumi Murakami seakan ingin memberitahu pembacanya bahwa buku pertamanya ini bukanlah karya yang sempurna. Ia mengatakan di awal bahwa yang ditulisnya hanya sekadar daftar. Bukan novel, bukan sastra, bukan pula seni. Hanya sejilid catatan dengan garis di tengah-tengah halamannya dan juga sedikit memiliki amanat. Seperti judulnya, cerita dalam buku ini mengalir begitu saja hampir tanpa klimaks. Seperti nyanyian angin yang begitu ringan dan tidak perlu dipertanyakan, buku ini menyejukkan memori pembaca hingga halaman terakhir. Dari ini, kita mengetahui kekuatan bercerita Murakami terletak pada keahliannya menuliskan tokoh yang biasa-biasa saja, menjalani kehidupan seperti orang kebanyakan, namun tetap bermakna untuk diceritakan.

(Yuni Dwi Yuliani)



Judul:  
**Dengarlah Nyanyian Angin**  
Pengarang:  
**Haruki Murakami**  
Penerbit:  
**Kodansha**  
Tahun terbit:  
**1979**  
Dimensi:  
**147 halaman**

Ilustrasi  
Viana A





# MANUSIA DAN ALIEN BISAKAH BERSINERGI?

Gilang Rahmat Hastanto

Pada tahun 1982, sebuah benda terbang asing (Beta) tampak di Afrika Selatan. Terkejut warga, heran sebab alien belum pernah ke sana. Hal yang terwakili oleh pernyataan pembaca berita TV nasional bahwa alih-alih parkir di langit Manhattan, Washington atau Chicago,

pesawat ini malah berhenti di atas langit Johannesburg. Lebih anehnya lagi, selama berbulan-bulan pesawat tersebut hanya diam di awang-awang, mengambang tanpa tujuan yang jelas. Hingga akhirnya, keingintahuan membawa manusia untuk mendobrak masuk pesawat tersebut. Apa yang menanti para

manusia di dalamnya adalah jutaan makhluk berwujud serupa *arthropoda*. Makhluk-makhluk tersebut berada dalam kondisi menyedihkan setelah berbulan-bulan menggantung terkatung-katung. Jarang sekali kita melihat alien digambarkan tidak berdaya, kumuh dan kurang gizi, bukan? Manusia pun memutuskan

membawa populasi alien tersebut ke darat dan membuatkan penampungan bagi mereka yang diberi nama “*District 9*”.

Namun, pembauran dua spesies ini malah memunculkan berbagai masalah sosial. Para alien ini (yang oleh manusia disebut “*prawns*”) dianggap tidak cocok hidup berdampingan dengan manusia. Multinational United (MNU), sebuah perusahaan persenjataan, ditunjuk untuk merelokasi mereka. MNU pun menugasi seorang birokrat canggung bernama Wikus van de Merwe (Sharlto Copley) untuk memimpin operasi tersebut. Akan tetapi, sebagaimana kontak manusia dengan alien di film-film lainnya, penonton bisa menebak bahwa ini tidak akan berjalan mulus. Bahkan, Wikus sendiri pun tidak menyangka bahwa tugas ini akan membawanya pada pengalaman yang ganjil.

Film ini merupakan debut dari sutradara Neill Blomkamp, dengan dukungan produser Peter Jackson (trilogi *The Lord of The Rings*, *King Kong*, trilogi *The Hobbit*). Hebatnya, dengan bujet yang tergolong kecil, film ini berhasil masuk nominasi *Academy Award* untuk empat kategori sekaligus. Film ini pun terbilang sukses secara komersil karena berhasil mendulang pemasukan *box office* \$210 juta, atau tujuh kali lipat dari bujet-nya yang hanya sebesar \$30 juta.

Kepopuleran film ini pun didukung oleh kejadiannya yang terinspirasi dan dekat dengan kehidupan nyata. Sebut saja judul “*District 9*”, isu xenofobia, serta segregasi spesies yang mirip apartheid dalam film ini menjadi petunjuk bahwa film ini diilhami kejadian di *District Six*, Afrika Selatan.

Untuk penggemar *genre* fiksi ilmiah, film ini

dapat menjadi tontonan segar yang memberi perspektif baru. Selain adegan laga yang memang sudah menjadi menu rutin fiksi ilmiah, film bergaya *mockumentary* ini juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan yang secara ironis juga dimunculkan dalam diri alien. *Computer-Generated Imagery* (CGI) yang digunakan dalam film ini juga terbilang rapi. Tapi, sebelum menonton film ini pembaca harus ingat bahwa film ini penuh dengan adegan berdarah-darah dan dialog penuh serapah. Hal-hal itu bagi sebagian orang mungkin berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Lain halnya jika penonton menganggap *scene-scene* tersebut bukan masalah, maka menonton film ini bisa memberi pengalaman yang menarik.

Jadi, bagaimana pembaca? Sudah tertarik menyimak filmnya?



**Judul** *District 9*

**Waktu Rilis** Agustus 2009  
**Negara Asal** Selandia Baru, Amerika Serikat, Afrika Selatan

**Sutradara** Neill Blomkamp  
**Produser** Peter Jackson, Carolynne Cunningham  
**Penulis Naskah** Neill Blomkamp, Terri Tatchell

**Pemain** Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Vanessa Haywood, William Allen Young  
**Musik** Clinton Shorter  
**Sinematografi** Trent Opaloch  
**Editor** Julian Clarke  
**Durasi** 112 Menit



# Lukisan Indah di Serambi Madinah





**L**embut pasir putih, aroma laut, dan derau ombak dipadu dengan pohon-pohon kelapa yang melambai ke sana kemari mengikuti arah angin. Keindahan itu bisa pembaca dapati di Pulau Diyonumo, sebuah pulau kecil tak berpenghuni di Indonesia bagian Timur, tepatnya Provinsi Gorontalo. Pulau ini menyimpan keindahan yang tak kalah cantik dengan wisata lain provinsi tersebut. Namanya mungkin terdengar asing di

telinga para wisatawan, bahkan warga Gorontalo sekalipun.

Pulau Diyonumo terletak di Desa Deme, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jika berangkat dari pusat kota Gorontalo, perjalanan ke Pulau Diyonumo akan memakan waktu sekitar tiga jam perjalanan darat dan 10 menit perjalanan laut menggunakan kapal kecil milik nelayan setempat. Tarif perahu per orang berkisar

Rp20.000,00 untuk perjalanan pergi dan pulang.

Untuk masuk dan menikmati keindahan area Pulau Diyonumo, pengunjung tak perlu merogoh kocek karena pulau ini sendiri masih tak berpenghuni. Kelapa hijau yang menjadi prasyarat sah jadi anak pulau, tersedia di sini. Di area pulau, terdapat warung kecil milik warga setempat yang menyediakan kelapa hijau dan berbagai camilan ringan.



Foto  
Sandy

Meski fasilitas yang ada masih memerlukan banyak poleasan, tetapi pengunjung Pulau Diyonumo akan dimanjakan oleh berbagai keindahan panorama pantai, daratan, dan bawah laut. Salah satu yang dapat dinikmati adalah keindahan alam puncak bukit ilalang yang seringkali jadi *spot* favorit para wisatawan untuk berswafoto. Menuju puncak bukit, pengunjung tak perlu bersusah payah

mendaki jalanan terjal layaknya mendaki gunung. Di sana sudah tersedia tangga beton sehingga pengunjung dapat dengan mudah menuju puncak sembari menikmati pemandangan hijau padang ilalang. Tak jarang, pengunjung juga dapat melihat para nelayan lalu lalang melintas mencari ikan.

Tak cukup padang ilalang, pantai pasir putih Pulau Diyonumo pun begitu menawan. Paduan warna hijau dari

hamparan rerumputan di puncak bukit dengan putihnya pasir di pantai, serta birunya air laut yang mengelilingi pulau menambah cantiknya lukisan Sang Maha Kuasa di serambi madinah ini.

Kusadari Engkau Sang Pencipta Yang Maha Indah, siapa yang tak rindu dengan mahakarya indah ini?

(Sandy Junefri P.)

# Teka Teki Sobwas

## Mendatar

- 5 Kegiatan menghabiskan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 7 Penurunan kegiatan ekonomi yang signifikan dalam beberapa waktu
- 8 jenjang jabatan auditor
- 11 kecil, tak terlihat
- 12 kelompok usaha kecil dan menengah
- 13 Keluarga penerima manfaat
- 14 Usaha meningkatkan kompetensi

## Menurun

- 1 himpunan bank milik negara
- 2 Penegasan dari pihak lain
- 3 Certified Internal Auditor
- 4 Penasihat
- 6 Bantuan keuangan
- 9 Bantuan pelaku usaha mikro
- 10 Dalam negeri
- 15 Internal Audit Capability Model

## Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di halaman TTS atau di selembar kertas
2. Foto/scan jawaban
3. Kirim jawaban ke [wartapengawasendigital@gmail.com](mailto:wartapengawasendigital@gmail.com) dengan subjek: Jawaban Teka Teki Sobwas 3/2020
4. Cantumkan Nama Lengkap, Nomor Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi/Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)

**Batas pengelmin jawaban TTS: 31 Desember 2020**

Pemenang terpilih akan mendapat merchandise menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 4/2020 dan media sosial BPKP.

**Pemenang TTS WP 2/2020:**

1. Ventiyana Pertiwi - Papua Barat
2. Wildan Faturrahman - DIY
3. Aini Dypta - Kalimantan



# Kanal Pengaduan BPKP

**Laporkan** indikasi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, bansos, dan PBJ melalui **Kanal Pengaduan BPKP**



@bpkpkawal



0852 83 200 100



kawal.akuntabilitas@bpkp.go.id



## 02 **PANDEMI COVID-19 DAN MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

Oleh: Richardo Saragih

## 05 **SUDAH SIAP JADI COACHEE?**

Oleh: Siska Sari Widuri

## 09 **MENYEMAI AGILE MINDSET, STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DI TENGAH KRISIS**

Oleh: Nur Ana Sejati, Rima Melati Anggraeni, Hanna Octoviani

# Pandemi Covid-19 dan Momentum Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

**Richardo Saragih,**

Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita resmi statistik pada tanggal 5 Agustus 2020. Pada rilis tersebut BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 terkontraksi sebesar -5,32% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 (y-on-y). Konsumsi rumah tangga merupakan sumber kontraksi terbesar, yaitu sebesar -2,96%.

Hal ini tentu wajar mengingat pada masa pandemi Covid-19 terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak pembatasan-pembatasan untuk menekan angka penularan Covid-19 mau tidak mau memaksa masyarakat untuk melakukan penyesuaian konsumsi. Peningkatan pendapatan masyarakat cenderung akan meningkatkan konsumsi, demikian juga sebaliknya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi

nasional agar pada triwulan III 2020 ini kembali mengalami pertumbuhan positif. Beberapa upaya yang telah dilakukan, secara khusus untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di antaranya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Penyaluran bantuan modal bagi pelaku usaha mikro diharapkan dapat menjaga agar kegiatan usaha kecil mikro (UMKM) tetap bisa bertahan di tengah krisis akibat Covid-19. Demikian juga pemberian BST maupun BSU diharapkan dapat segera dibelanjakan oleh masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM tersebut, sehingga sasarannya akan terjadi perputaran uang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ketiga upaya tersebut akan efektif dengan syarat penerima program bantuan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah tumpang tindih penerima bantuan dari sumber bantuan yang berbeda atau dalam satu keluarga menerima bantuan lebih dari satu orang.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada saat melakukan kegiatan evaluasi bantuan sosial, bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang dijadikan data *by name by address* (BNBA) dalam menetapkan penerima BST-APBN tidak *update*. Ada anggota masyarakat desanya yang sudah lebih baik taraf sosial ekonominya, ada yang sudah pindah ke daerah lain, bahkan ada yang sudah lama meninggal masih terdaftar sebagai penerima BST-APBN. Di sisi lain, ada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, namun tidak terdata pada DTKS.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 mengatur pada pasal 6 terkait pengusul calon penerima BPUM adalah dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah. Banyaknya calon pengusul ini tentu memiliki risiko adanya irisan data (duplikasi) antara sesama pengusul,

juga ada potensi UMKM yang tidak terdata karena tidak memiliki akses kepada institusi pengusul tersebut.

### Momentum Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pada poin optimalisasi pelaksanaan jaring pengaman sosial menginstruksikan dua hal terkait dengan BNBA, yaitu:

Melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud;

Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya.

Pandemi telah mengajarkan kita bagaimana tetap *fight* (berjuang) dan produktif dengan menggunakan cara yang baru dalam kehidupan. Perubahan cara baru tersebut seharusnya dapat juga diimplementasikan oleh pemerintah pada aktivitas lain dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan secara khusus dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional.

Pemutakhiran data BNBA dapat dilakukan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran setidaknya melalui empat langkah. Pertama, melibatkan kepala desa/lurah dan jajarannya, sehingga anggaran perjalanan dinas yang tinggi untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan tidak lagi menjadi kendala. Di samping itu, desa/kelurahan lah yang paling mengetahui kondisi masyarakat maupun

UMKM yang ada di lingkungannya.

Kedua, menyusun pedoman pemutakhiran data yang jelas yang dapat dijadikan panduan oleh kepala desa/lurah dan jajarannya dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Mekanisme pelaksanaannya, KPM dan UMKM yang langsung datang ke kantor desa/kelurahan mendaftarkan dirinya, sehingga hanya KPM dan UMKM yang benar-benar ada di desa/kelurahan tersebut yang dapat mendaftar. Pemerintah desa/kelurahan dan jajarannya melakukan validasi kesesuaian pendaftar dengan kriteria yang telah ditentukan pada pedoman. Hasil pendataan calon penerima bantuan/stimulus ekonomi sementara diumumkan di papan informasi desa/kelurahan untuk diketahui masyarakat umum.

Ketiga, membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan bilamana ada KPM maupun UMKM calon penerima bantuan/stimulus sementara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai pengendalian agar hasil pendataan benar-benar bisa diandalkan dan tepat sasaran, pemerintah bisa membukan layanan pengaduan (*call center*) dengan telepon, *WhatsApp*, *email* atau sms. Hasil pengaduan tersebut divalidasi dan ditindaklanjuti dalam periode waktu tertentu

dan diumumkan kembali pada papan informasi desa/kelurahan. Dengan dibangunnya sistem *check and balance* sedemikian rupa, dapat meminimalisasi risiko aparat desa/kelurahan dan jajarannya yang berbuat curang dengan sengaja tidak mengusulkan KPM dan UMKM yang bukan kelompok atau golongannya.

Keempat, menyiapkan sistem informasi untuk menggabungkan seluruh data hasil pemutakhiran secara berkala. Masing-masing desa/kelurahan mengirimkan data hasil pemutakhiran ke dalam sistem informasi yang telah disiapkan sehingga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan BNBA tersebut dengan membagi yang mana menjadi tanggungan APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota dan APBDesa. Dengan demikian kapasitas dan populasi penerima bantuan/stimulus dapat diperluas dan ditingkatkan.

Sistem informasi tersebut diharapkan dapat menjadi data terpadu kesejahteraan ekonomi dan sosial (KPM dan UMKM) yang secara berkala dapat dimutakhirkan oleh desa/kelurahan dengan validasi yang diatur secara berjenjang. Data tersebut selalu siap sedia mendukung eksekusi program pemerintah di bidang sosial dan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

# Sudah Siap Jadi Coachee?

Siska Sari Widuri,  
Kepala Subbagian Pengembangan dan Manajemen Talenta

*"A coach is someone that sees beyond your limits and guides you to greatness" - Michael Jordan*

Petikan *quote* di atas, dari seorang maestro di lapangan bola basket, jelas menggambarkan bahwa *coach* memiliki peran yang luar biasa dalam mengembangkan potensi orang-orang yang dilatihnya. Namun, dalam pernyataan itu juga tergambar bagaimana sosok yang dilatih untuk memahami dirinya sendiri, menyadari tentang potensi yang dimiliki. Terkait dengan hal itu, sangat relevan dengan salah satu artikel di *Harvard Business Review* (HBR) berjudul "Are You Ready to Be Coached?" (Steinberg, 2020), yang menggelitik rasa ingin tahu saya sebagai bagian dari Biro Sumber Daya Manusia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan proses *coaching* sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan sang *coachee* dalam menerima arahan.

## Mengenal *Coaching*

*Coaching* (AITSL, 2020) adalah salah satu teknik pengembangan kompetensi yang melibatkan seorang *coach* yang lebih berpengalaman atau memiliki kemampuan tertentu untuk membimbing *coachee* meningkatkan kompetensinya. Melalui *coaching*, pengembangan kompetensi dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan potensi seorang pegawai.

Biasanya, interaksi antara *coach* dan *coachee* digambarkan sebagai *partnership*. *Coach* berperan sebagai fasilitator sehingga *coachee* dapat melakukan introspeksi dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tujuan *coaching* tercapai. Dalam hubungan *coach-coachee*, fokusnya ada pada *coachee*. *Coachee*-lah yang secara independen meng-

gali kebutuhan kompetensinya, metode apa yang digunakan dalam pengembangan kompetensi, dan mereviu kemajuan proses *coaching*.

Salah satu model *coaching* yang lazim digunakan adalah *GROW Model*, yang dikembangkan oleh Sir John Whitmore. Model ini mulai populer digunakan pada tahun 1980-an dan masih terus digunakan dalam kegiatan *coaching* karena cukup sederhana dan terstruktur. *GROW model* (Southampton University, 2020) terdiri atas empat langkah, yaitu:

1. Menentukan tujuan dari *coaching* (*Goal setting*);
2. Introspeksi atas keadaan sekarang (*Reality checking*);
3. Menentukan alternatif aksi atau strategi (*Options*);
4. Merencanakan bentuk, pelaku, waktu kegiatan atas opsi yang dipilih (*What, When, by Whom*).

Dengan model ini, *coach* tidak diharapkan untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan *coachee*. *Coach* membimbing *coachee* dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing *coachee* untuk menemukan jawabannya.

### Nilai dan Biaya *Coaching*

Rata-rata biaya yang diperlukan untuk *coaching* adalah USD500/jam (HBR, 2020). Dengan durasi *coaching* yang bervariasi, mulai dari 7 bulan sampai 12 bulan, maka investasi yang diperlukan untuk meng-*coach* satu orang bisa mencapai USD 10.000.

Dengan investasi sebesar itu, maka organisasi perlu memastikan bahwa *return on investment* yang diterima organisasi pun sepadan. McIntyre (2020) dalam studinya menjabarkan bahwa *coaching* merupakan metode pengembangan kepemimpinan

yang jauh lebih efektif daripada *classroom training*.

Melalui *coaching*, *coachee* dapat mendapatkan *insight* yang lebih tajam atas lingkungan kerja, dirinya sendiri, dan perilaku yang perlu diubah. Hasilnya adalah calon pemimpin yang lebih ulet dan flexible dalam menghadapi kendala.

Selain itu, *coaching* menyediakan media bagi *coachee* untuk melakukan introspeksi terhadap hasil dan proses pembelajaran yang dilaluinya. Melalui refleksi diri ini, maka *coachee* pun memperoleh keterampilan untuk merencanakan kegiatan pengembangan diri maupun orang lain.

Manfaat lain yang diperoleh dari *coaching* adalah penguatan kompetensi sosio kultural dari seorang *coachee*. Proses *coaching* seringkali menuntut *coachee* untuk melihat suatu situasi sulit dan memikirkan strategi untuk menanganinya. Strategi penanganan situasi sulit ini memerlukan pemahaman latar belakang pihak-pihak yang terkait, dan kemauan untuk melihat situasi yang sama dari berbagai sudut pandang.

### Implementasi *Coaching* di BPKP

*Coaching* merupakan salah satu metode pengembangan talenta sesuai Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta di BPKP. Selain itu, dalam kerangka *Government Internal Auditor Corporate University*, *coaching* digadag-gadag mengambil porsi 20 persen dari keseluruhan proses pengembangan pegawai selama karirnya. Melalui *coaching*, organisasi dapat menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan, mempererat relasi antar generasi, dan meningkatkan kerekatan da-

lam organisasi. Bagi organisasi, *coaching* memberikan nilai tambah yang tidak sedikit.

Artikel HBR di atas menegaskan juga bahwa *coaching* merupakan proses yang mengambil waktu dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan *coaching* agar hasilnya efektif. Selain memastikan adanya pegawai dalam organisasi yang bisa berperan sebagai *coach*, organisasi juga harus menata *mindset* SDM agar siap menerima bimbingan sebagai *coachee*.

Selama ini fokus pengembangan kompetensi SDM ditujukan untuk meningkatkan keterampilan melakukan *coaching*. Artinya, program-program pengembangan kompetensi dirancang sedemikian rupa agar seseorang siap menjadi *coach* yang membimbing pegawai lainnya mencapai potensi optimal. Nah, upaya pengembangan yang sudah dilakukan ini berarti baru menyentuh satu dari dua pihak yang terlibat. Agar proses *coaching* bisa berhasil optimal, maka pegawai yang menjadi *coachee* pun harus siap.

### **Apa yang perlu dilakukan sebagai *Coachee*?**

Dari diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para *executive coaches*, Steinberg (2020) menarik kesimpulan bahwa *coachee* yang berhasil mengoptimalkan proses *coaching* biasanya memiliki beberapa karakteristik.

Pertama, bersedia meninggalkan zona nyaman. *Coachee* biasanya merupakan pegawai yang memiliki potensi cukup tinggi, baik secara kognitif maupun secara teknis. Alasan para *coachee* ini mengikuti program *coaching* adalah mempersiapkan diri untuk

ke level selanjutnya. *Coachee* dituntut untuk dapat mengevaluasi *gap* antara tujuan (*Goal*) dan kenyataan (*Reality*) yang ada.

Saat mengevaluasi kondisi saat ini, *coachee* dituntut untuk bersedia melihat realita yang ada dengan perspektif yang baru, sehingga dapat mengidentifikasi kekurangan pada dirinya untuk dibenahi. Di tahap ini, *coachee* harus berani meninggalkan zona nyaman dan mengakui kekurangan yang dimilikinya.

Kedua, terbuka untuk melakukan hal baru. *Coachee* yang merasa bahwa metodenya selama ini sudah benar mengantarkannya untuk sukses, seringkali enggan merubah cara kerjanya. Jika pegawai tersebut sudah yakin bahwa metodenya adalah yang paling benar, maka ia akan kesulitan mengikuti proses *coaching*. *Coachee* yang paling berhasil adalah yang membuka diri mencoba hal baru, nyaman dengan kegagalan, dan segera bangkit untuk mencoba lagi.

Ketiga, tidak gampang mengeluh dan mau mengakui kesalahan. Seseorang yang selalu menyalahkan pihak lain, atasan, organisasi, dan lingkungan atas kegagalannya seringkali tidak mendapatkan nilai tambah dari proses *coaching*. Pegawai yang mampu mengatribusikan kegagalan terhadap kekurangan pada dirinya sendiri, akan dapat menumbuhkan komitmen pribadi untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Tanggung jawab atas perbaikan nasib seseorang ada pada diri sendiri.

Keempat, disiplin pribadi. *Coaching* merupakan proses yang dikontrol oleh para *coachee*, mulai dari perencanaan, kegiatan pengembangan, sampai evaluasi proses. Oleh karena itu, seorang

*coachee* dituntut untuk konsisten menjaga motivasi dan inisiatif selama proses *coaching*. Disiplin diri merupakan kunci untuk dapat selalu fokus pada tujuan *coaching* yang ingin dicapai.

Yang terakhir, tidak malu meminta dukungan dari orang sekitar. Dalam proses *coaching*, *coachee* memerlukan dukungan tidak hanya dari sang *coach*, namun juga dari rekan kerja, atasan, bahkan anak buah. Dukungan tersebut bisa berupa dukungan moral, maupun dukungan yang bersifat teknis dalam melaksanakan kegiatan pengembangan. *Coachee* harus dapat mengomunikasikan tujuan proses *coaching*, mendengarkan usulan atau masukan, dan juga menindaklanjuti masukan yang diberikan kepadanya. Dengan keterbukaan untuk menerima masukan dari orang lain, maka seorang *coachee* mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan yang

lebih kuat dengan orang-orang sekitarnya, dan dapat bertransformasi untuk menjadi pemimpin yang efektif.

Nah, siapkah Anda untuk menjadi *coachee*?

#### References:

<https://hbr.org/2009/01/what-can-coaches-do-for-you>

<https://hbr.org/2020/10/are-you-ready-to-be-coached>

<https://www.aitsl.edu.au/lead-develop/develop-others/coach-others/coaching-resources>

<https://cdn.southampton.ac.uk/assets/>

MacIntyre, P. L. (2020). Supporting Change Leaders with Executive Coaching. *International Journal of Organizational Innovation*, 12(4), 375–386.

# Menyemai Agile Mindset, Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP di Tengah Krisis

**Nur Ana Sejati**, Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

**Rima Melati Anggraeni**, Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

**Hanna Octoviani**, Verivikatur Keuanga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah mencatat, kesuksesan Alexander *the Great* menaklukkan dunia tak bisa dilepaskan dari peran tiga orang yang sangat penting dalam hidupnya. Pertama, ibunya telah berhasil menancapkan keyakinan diri akan trahnya sebagai putra Zeus, yang di kemudian hari kehebatannya jauh melampaui siapapun. Kedua, ayahnya memiliki peran dalam menentukan bagaimana seorang anak raja harus memiliki pendidikan yang mumpuni. Meski secara intelektual dan spiritual sang ayah tidak banyak memberikan warna dalam membangun jiwanya, tapi dia berhasil memilih guru terbaik dan menyediakan lingkungan yang membuat Alexander bisa belajar langsung dari alam raya. Terakhir, Aristoteles, sang guru, telah berhasil menorehkan sikap pantang menyerah dan mengobarkan bara

semangat membara dalam diri Alexander untuk menguasai kerajaan-kerajaan dari Romawi, Persia, hingga Asia.

Kisah Alexander *the Great* memang telah berlalu lebih dari dua puluh abad yang lalu. Namun, bagaimana karakter dan kemampuan ksatria dari Macedonia ini layak untuk menjadi refleksi dalam membangun karakter dan peningkatan kompetensi SDM masa kini. Belajar dari kisah Alexander *the Great*, kita bisa menyaksikan bagaimana karakter dan kompetensi yang hebat bukanlah hal yang mustahil. Kedua hal itu pun tidak lahir karena kehebatan Alexander, tapi ditanam dan dipupuk oleh ibunya, ayahnya, dan sang guru.

Menyoal kompetensi, adanya perubahan era lingkungan menuntut adanya penyesuaian

dan peningkatan kemampuan. Heracletos (504 – 480 sebelum Masehi) seorang filsuf Yunani pernah mengatakan, “*Nothing endures but change*” – “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.” Sebuah perubahan adalah mutlak adanya seiring dengan perguliran sang waktu. Perubahan yang paling mendasar yang paling nyata dirasakan saat ini adalah perubahan teknologi yang telah merubah banyak aspek dalam hidup manusia, tak hanya komunikasi tapi juga interaksi sosial dan perilaku.

Memasuki era industri 4.0, kecepatan dan kemudahan penyediaan layanan menjadi kunci keberhasilan pelaku industri. Tak heran kalau kemudian bermunculanlah beragam aplikasi yang memungkinkan konsumen cukup menggerakkan jarinya tanpa berpindah tempat untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Era ini juga semakin memberikan ruang kepada publik untuk memperoleh dan berbagi informasi secara lebih cepat tanpa batasan ruang dan waktu.

Di saat gencarnya pemerintah mendukung era industri 4.0, pandemi Covid-19 melanda seluruh belahan dunia. Di satu sisi pandemi menjadi ancaman, meski di sisi lain memaksa manusia melakukan perubahan dengan terus berinovasi. Pandemi ini telah menciptakan perubahan sistem kerja pegawai baik di sektor privat maupun publik untuk bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH), yang sebelumnya hanya sebatas wacana. Pegawai pun akhirnya mampu beradaptasi bagaimana menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan mereka tetap terus bekerja meski dari rumah. Tak

hanya pegawai, tapi juga pelajar dan mahasiswa juga diberlakukan belajar dari rumah atau *study from home* (SFH).

Lingkungan sudah berubah begitu cepat. Mampukah instansi pemerintah beradaptasi untuk melakukan perubahan?

### **Memahami Agile Auditor**

Meski telah menjadi *buzzword* dan *trending topic* dalam literatur *auditing* internasional, istilah ‘*agile*’ masih belum ada standar padanan kata dalam bahasa Indonesia. *Agile* sering diterjemahkan dengan gesit, atau lincah, tangkas atau cekatan. Namun, tak banyak yang menggunakan terjemahan *agile* tersebut dalam penulisan artikel atau kajian kebijakan. Kata *agile* lebih sering digunakan tanpa diterjemahkan sama sekali.

Oxford Dictionary mendefinisikan *agile* sebagai *able to move quickly and easily* dan *able to think quickly and in an intelligent way*. Kedua definisi di atas menegaskan tentang kemampuan untuk melakukan sesuatu secara cepat dan mudah; dan kemampuan untuk berfikir secara cepat dan cerdas. Jika dilekatkan dengan auditor, maka tergambar sosok yang mampu bergerak secara lincah dan sanggup berfikir secara cepat dan cerdas.

Meski populer di dunia internasional maupun di tingkat nasional, kata *agile* sepertinya masih terdengar *exclusive* atau mengawang-awang bagi auditor di daerah. Memang, dalam banyak hal kata tersebut sering dibincangkan dalam topik diskusi pada konferensi ataupun seminar level nasional maupun internasional, tapi kurang terjamah dalam kegiatan sehari-hari *auditor*. Belum lagi, penugasan auditor di daerah masih dikesankan oleh penugasan sebagai mana bisnis pada umum-

nya (*as business as usual*) yang belum membutuhkan karakter seorang auditor yang mampu melakukan *agile audit*.

### Benarkah demikian?

Diakui atau tidak, pandemi Covid-19 memaksa penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan perubahan. Apa yang pernah dikatakan oleh Bernard Marr (2009), tentang *more with less* seperti ini harus di respon, yaitu bagaimana instansi pemerintah mampu memberikan layanan yang lebih baik meski dengan sumber daya yang semakin sedikit. Covid-19 telah menjadi faktor pendorong yang kuat agar instansi pemerintah tetap mampu produktif ditengah pemotongan anggaran besar-besaran. Pelayanan publik harus tetap berjalan, meski harus menetapkan standar kerja yang baru mengikuti kaidah *New Normal*.

Kondisi ini memberikan *moment* yang tepat agar auditor dapat mengubah *mindset* atau pola pikirnya menjadi *agile*. Dalam paparannya ketika menjadi *keynote speakers* kegiatan webinar dengan tema membangun ASN profesional dan berkelas dunia. Kepala LAN menyatakan bahwa ada lima hal yang harus menjadi perhatian ASN, termasuk auditor, dalam menghadapi tantangan era 4.0 dan tata kehidupan baru semasa dan paska pandemic Covid-19, yaitu (1) *Bureaucracy operational efficiency* (2) *Digital literacy* (3) *Agile Mindset* (4) *Public service responsiveness* (5) *Integrated and flexible working methods*. Kelima hal ini merupakan satu kesatuan utuh kemampuan yang wajib dimiliki oleh ASN Indonesia di manapun berada, termasuk APIP.

Tentang hal ini juga telah

diulas oleh para professional Deloitte pada tahun 2017 dalam kajiannya yang berjudul *Becoming Agile: A Guide to Elevating Internal Audit's Performance and Value*. Dalam kajian tersebut dinyatakan bahwa *agile internal audit* adalah *mindset* fungsi internal audit yang berfokus pada kebutuhan *stakeholder*, percepatan siklus audit, memberikan wawasan (*insight*) tepat waktu, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan manfaat, dan menghasilkan dokumen yang lebih sedikit.

Untuk menjalankan *agile internal audit*, Mantan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dalam Konferensi Nasional IIA tahun 2018 menyatakan audit intern yang *agile* dapat dibangun secara efektif jika institusi audit intern mengikuti *road map* pengembangan kapabilitas APIP dan membangun kolaborasi lintas sektoral untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan kompetensi terkait *subject matter* yang semakin beragam.

Paparan Deloitte, Kepala LAN maupun Mantan Kepala BPKP memperlihatkan bahwa *agile* tidak mengedepankan pada subjek, apakah di tingkat pusat atau daerah, tapi pada kemampuan auditor yang mampu mengadaptasi metode kerja yang berorientasi pada *stakeholders*, kecepatan penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan, kemampuan adaptasi, serta dapat melakukan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, adaptasi metodologi *agile audit* pun juga harus direspon oleh APIP daerah karena tantangan di daerah pun dalam kondisi saat ini tak jauh berbeda dengan yang ada di pusat pemerintahan.

## Akselerasi Peningkatan Kompetensi APIP

Untuk mampu menjalankan penugasan pengawasan dengan *agile*, satu hal penting yang harus dilakukan adalah membangun kompetensi APIP (*intangible asset*) yang profesional dan siap beradaptasi dengan perubahan. Sekitar dua puluh tahun lalu Robert Kaplan (2001) telah mengingatkan kita tentang pentingnya membangun *intangible asset* dalam suatu organisasi. Dengan kerangka konseptual *Balanced Scorecard* (BSC), Kaplan menegaskan perlunya berinvestasi pada *intangible asset* yang akan mengakselerasi pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*), memperbaiki proses bisnis, membangun loyalitas pelanggan hingga akhirnya mewujudkan dalam bentuk keuntungan finansial.

*Framework* BSC yang diusung Kaplan memberikan gambaran bagaimana *intangible asset* harus dikelola dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Bernard Marr (2007) bahwa dari hasil survey yang dilakukan, mayoritas CEO menyatakan pentingnya membangun *intangible asset*. Sayangnya, tidak banyak perusahaan yang mengeluarkan dana yang cukup untuk peningkatan kompetensi. Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh APIP daerah. Misalnya, dari penugasan yang dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP Sulsel, masih banyak APIP yang belum memenuhi kriteria pemenuhan diklat dan pelatihan.

Dalam konteks membangun kompetensi APIP yang mengadopsi *agile mindset*, maka BPKP sebagai Pembina harus mampu melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kompetensi APIP guna memperbaiki tata kelola,

manajemen risiko, dan SPIP di era yang membutuhkan auditor yang memiliki *agile mindset*. Hal ini pada prinsipnya juga telah dinyatakan dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Secara Mandiri bahwa BPKP menyediakan diklat baik penjenjangan maupun teknis. Selain itu sebagai pembina, kedeputian dan perwakilan juga menyelenggarakan sarana konsultasi (*help desk*) peningkatan kapabilitas.

## Membangun *Learning Organization*

Sejalan dengan tuntutan perubahan, APIP tidak hanya memerlukan auditor yang sadar akan pentingnya proses pembelajaran untuk meningkatkan nilai tambahnya dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tapi, APIP juga harus mengembangkan kompetensinya secara kelembagaan, bukan sekedar individu pembelajar, tetapi juga membangun *learning organization* atau organisasi pembelajar.

Peter Senge (Garvin (1993) mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai organisasi di mana orang-orang secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam menciptakan sesuatu yang mereka inginkan, pola pikir baru ditumbuhkan, tujuan bersama diberikan ruang, dan orang-orang di dalamnya belajar bagaimana mereka belajar bersama. Hal yang sedikit berbeda dinyatakan oleh Garvin (1993) yang mengatakan bahwa organisasi pembelajar juga mencakup perilaku bagaimana organisasi merespon pengetahuan dan wawasan baru yang telah diciptakan, didapatkan, dan didistribusikan ke seluruh anggota organisasi.

Penjelasan Senge dan Garvin menyiratkan bahwa untuk men-

ciptakan organisasi pembelajar, dibutuhkan strategi untuk membangun budaya belajar. Dalam konteks pengendalian, membangun infrastruktur berupa kebijakan tidaklah cukup, tetapi perlu membangun *soft control*. Tentang hal ini, Senge (1993) menawarkan lima aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan organisasi pembelajar, yaitu: *systems thinking* (1); *personal mastery* (2); *mental model* (3); *building shared vision* (4); dan *Team Learning* (5). Kelima hal ini merupakan satu kesatuan langkah yang tidak bisa dipisahkan untuk menginstal *learning* dalam organisasi.

*System thinking* mengharuskan organisasi untuk mampu melihat dirinya sebagai satu potret yang utuh, bukan potongan-potongan *puzzle*. Dalam implementasinya, strategi membangun budaya pembelajar harus dilekatkan sebagai satu bisnis proses yang terintegrasi dengan pencapaian misi organisasi. *Personal mastery* mengarahkan individu untuk untuk kembali visi pribadi, memfokuskan energi, membangun ketangguhan, dan melihat realitas secara obyektif. Seseorang yang memiliki *personal mastery* mampu secara konsisten memberikan manfaat dan memberikan pengaruh besar dalam organisasi. Hal ini karena mereka mampu melihat apa yang mereka lakukan sebagai sebuah karya seni bernilai tinggi, bukan sekedar pemenuhan tugas semata. *Mental model* mensyaratkan individu dalam organisasi mampu mengubah pola pikirnya dengan menggali potensi yang dan mampu mengkritisinya.

*Building shared vision* atau membangun visi bersama merupakan prasyarat untuk membangun budaya pembelajar yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing

individu, tetapi harus dilakukan secara organisasional. *Team learning* menegaskan bahwa prose pembelajaran tim sangat efektif dalam menumbuhkan inovasi dalam organisasi. Bersama tim, individu dapat saling belajar sehingga dapat melesatkan proses pembelajaran dibandingkan dengan jika dilakukan secara individu.

### **Membangun Kompetensi APIP dengan Menumbuhkan Budaya Pembelajar**

Tinjauan literatur di atas memberikan benang merah bagaimana kompetensi APIP yang memiliki mindset *agile* dapat dibangun dengan membangun organisasi pembelajar yang dapat digunakan sebagai pijakan bagi BPKP sebagai Pembina APIP. Sebagaimana yang dikatakan Gavin (1993) organisasi pembelajar tidak tumbuh begitu saja, tapi perlu strategi untuk membangun hingga mampu memberi manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Karya tulis ini disusun dengan menggunakan kerangka teori sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### **Revitalisasi Peningkatan Kompetensi APIP Berbasis Teknologi**

Dengan kondisi yang penuh dengan perubahan saat ini, siapkah APIP menghadapi tantangan zaman?

Era Industri 4.0 dan pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia. Serangkaian peraturan telah dikeluarkan untuk mempercepat penanganan pandemi. Peraturan-peraturan tersebut begitu cepat diterbitkan dan mengharuskan APIP untuk mampu menyerap dan memahaminya dengan cepat. Hal ini tentu juga menuntut respon yang

cepat dan tepat atas penerapan peraturan-peraturan tersebut.

Dalam konteks peningkatan kapabilitas APIP, kondisi yang terjadi di lapangan saat ini memperlihatkan APIP masih tertatih dalam menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ada, baik dengan tuntutan revolusi industri 4.0 maupun dalam merespon pola kerja baru di masa dan pandemi. Sebagai contoh di tengah era digital saat ini, masih ada APIP yang belum mengetahui beberapa aplikasi untuk *smartphone* yang bisa digunakan untuk *scanning* data agar memudahkan pekerjaan apabila harus mengirimkan dokumen dalam bentuk *softfile*.

Tidak hanya kendala pada SDM, sarana dan prasarana yang tersedia pun belum merata. Seperti contoh untuk jaringan internet pada tiap daerah berbeda, hal ini pun akan menghambat dalam proses pengiriman data yang dibutuhkan secara cepat. Kondisi-kondisi seperti diatas adalah kendala yang masih sering ditemui pada APIP di era digital saat ini. Apalagi di masa pandemi saat ini yang mengharuskan ASN bekerja dari rumah, kemampuan penggunaan fitur atau aplikasi yang memudahkan pekerjaan dan koneksi internet sangat dibutuhkan.

#### Mengapa Perlu Direvitalisasi?

Sebagai aparat pengawan internal, APIP dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang ada. Dalam hal ini, BPKP dan APIP juga diberikan mandat oleh presiden untuk mengawal pengelolaan dana penangan dan pencegahan Covid-19. Mandat ini mengharuskan APIP untuk tetap hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam

pengelolaan keuangan negara ditengah dan paska masa pandemi ini. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan.

Sebagai Pembina APIP, BPKP sudah melakukan upaya pembinaan. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, BPKP Sulsel, sebagai contoh, pelaksanaan pembinaan APIP selama ini sebenarnya sudah *semi online* dengan mengoptimalkan penggunaan *Whatsapp Group* (WA grup) sebagai sarana pemberian materi, instruksi dan diskusi. Meski demikian, beberapa tantangan atas pemanfaatan WA Grup masih menghadang.

Dalam komunikasi yang terjalin dengan APIP melalui media *Whatsapp Group* terkesan APIP seperti pasif dan terkesan menerima apa yang diarahkan oleh BPKP tanpa menggali informasi tersebut lebih lanjut. Padahal, sangat mungkin saja APIP belum benar-benar paham atas arahan yang diberikan. Pemberian materi melalui *Whatsapp Group* terlihat belum terlalu menarik rasa keingintahuan dari APIP. Hal ini terlihat dari pola komunikasi antara BPKP dan APIP melalui *Whatsapp Group* yang masih belum interaktif.

Perubahan metode kerja tim Perwakilan BPKP yang berfokus pada pelaksanaan bimbingan teknis dan QA atas penilaian Kapabilitas APIP dinilai perlu untuk dilakukan perubahan. Keterbatasan hari penugasan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembinaan. Sedangkan, peningkatan kapabilitas merupakan sebuah proses yang panjang.

Perubahan yang kami tawarkan adalah melakukan optimalisasi PPM dengan melibatkan *stakeholders* dan *workshop* secara online ser-

ta webinar sebagai fondasi peningkatan kompetensi. Rerangka BSC sebagaimana yang telah teruji di banyak organisasi menunjukkan bahwa membangun *intangible asset*, dalam hal ini membangun kompetensi APIP, merupakan modal dalam menjalankan bisnis proses yang ekonomis, efisien dan efektif. Pada akhirnya, investasi pada *intangible asset* ini akan mendorong percepatan pencapaian Kapabilitas APIP level 3, atau bahkan level 4.

Memang, BPKP sudah memiliki GIA (*Government Internal Auditor Corporate University*) yang menyelenggarakan berbagai webinar dengan narasumber-narasumber andal. Hal yang sama juga telah ditempuh oleh Biro SDM yang sudah menginisiasi PPM *online*. Animo Auditor BPKP maupun APIP terlihat begitu besar untuk mengikuti pengembangan kompetensi ini. Selain ilmu, mengikuti kegiatan semacam ini menjanjikan angka kredit yang selama ini cukup sulit dicapai.

Jika demikian, mengapa harus ada perubahan atas kegiatan yang sama?

Letak perbedaan revitalisasi dengan kegiatan pengembangan SDM secara *online* adalah pada perubahan metode kerja, siapa penanggungjawab, dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu prinsip *New Public Management* (NPM) yang relevan untuk menjawab hal ini adalah istilah *let managers manage*. Pembangunan kompetensi APIP dilakukan melalui revitalisasi PPM dan *Workshop* serta *Webinar* terintegrasi dalam kegiatan peningkatan kapabilitas APIP yang melekat pada bidang P3A pada setiap Perwakilan BPKP.

*Let managers manage* merupakan suatu prinsip yang lahir didasari

oleh pemahaman bahwa manager, dalam hal ini Korwas P3A, adalah pihak yang paling memahami apa yang terjadi di lapangan, termasuk permasalahan, tantangan, dan kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan. Peningkatan kompetensi APIP ala GIA Corpu tentu tidak dapat menjangkau permasalahan riil yang dihadapi oleh APIP di daerah. Belum lagi, jumlah peserta webinar yang mencapai ratusan hingga ribuan, menyebabkan komunikasi secara interaktif sulit diwujudkan.

Hal ini akan berbeda jika peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan secara paralel oleh Perwakilan BPKP. Permasalahan di tingkat pusat tentu berbeda dengan daerah, belum lagi perbedaan konteks antar daerah mengharuskan adanya identifikasi dan solusi permasalahan yang tidak sama. Sehingga, hal ini perlu penanganan yang berbeda untuk setiap permasalahan.

Desentralisasi pelaksanaan peningkatan kompetensi APIP, tidak sebatas diklat penjenjangan dan diklat substantif oleh Perwakilan BPKP membangun pola interaksi yang lebih intens dan efektif. Hal ini karena peningkatan kompetensi APIP di level perwakilan yang kami tawarkan melibatkan audien atau peserta yang terbatas di lingkup pemda dalam satu provinsi, tidak dalam skala besar. Dalam literatur membangun modal sosial organisasi, hal ini tidak hanya memfasilitasi peningkatan kompetensi, tetapi juga membangun sinergi yang lebih kuat dengan APIP daerah karena terbangunnya komunikasi.

Belum lagi, pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan *workshop*, PPM atau pun *Webinar* yang melibatkan APIP Dae-

rah akan memangkas anggaran peningkatan kompetensi SDM secara signifikan. Langkah ini menjadi krusial untuk diambil ketika pemangkasan anggaran secara besar-besaran dilakukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Bagi BPKP, revitalisasi ini juga akan menjembatani *silo* (*bridge the silo*) yang selama ini sulit ditembus. Metode kerja yang dibutuhkan mengharuskan adanya kesatuan langkah seluruh bidang untuk bersama-sama meningkatkan level. Bukankah peningkatan kapabilitas APIP juga terkait dengan bagaimana Bidang APD (Akuntabilitas Pemerintah Daerah) memberikan pemahaman tentang manajemen risiko dan SPIP? Bukankah peningkatan

kemampuan APIP daerah dalam mencegah korupsi juga bagian dari Bidang Investigasi? Demikian halnya dengan bidang-bidang lain yang secara keseluruhan harus terlibat dalam kegiatan.

Dalam tataran praktis, salah satu kendala dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 terkait penerapan PPBR di mana belum semua OPD telah melakukan penilaian risiko. Pelibatan APD dalam upaya peningkatan kompetensi perlu dilakukan agar OPD mampu menilai risiko.

Bagaimana Perubahan Dilakukan?

Gambar berikut menunjukkan bagaimana kerangka kerja meningkatkan kompetensi SDM APIP dapat dijalankan.



Revitalisasi Peningkatan Kompetensi APIP diharapkan dapat diterapkan di seluruh BPKP sehingga, untuk penerapannya tidak hanya berupa imbauan, tapi terintegrasi dalam strategi peningkatan kapabilitas APIP BPKP. Artinya, revitalisasi ini harus terinstitusionalisasi menjadi bagian dari satu kebijakan yang melekat. Meski demikian, kebijakan tersebut dibangun dengan mengedepankan aspek membangun budaya organisasi pembelajar.

#### Peran Korwas P3A

Sebagaimana yang terlihat dalam gambar, ujung tombak pelaksanaan revitalisasi ini adalah Bidang P3A. Dalam hal ini, korwas sebagai penanggung jawab kegiatan sekaligus sebagai pemilik risiko. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Korwas P3A adalah:

1. Melakukan identifikasi kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan dengan melibatkan bidang-bidang lain pada Perwakilan BPKP.
2. Menyusun kurikulum/materi dan jadwal kegiatan PPM/*Workshop Online* ataupun *webinar* yang akan dilaksanakan.
3. Berkoordinasi dengan bidang lain di Perwakilan BPKP untuk menjadi narasumber kegiatan peningkatan kompetensi. Korwas juga dapat mencari narasumber eksternal untuk materi-materi yang dipandang perlu.
4. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan kompetensi SDM secara online dengan APIP daerah.
5. Melakukan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan.

#### Kurikulum/Materi

Kurikulum atau materi disusun dari hasil identifikasi kompetensi APIP daerah dan mempertimbangkan tantangan Auditor yang dituntut lebih gesit (*Agile*) dalam meghadapi tuntutan perubahan. Dalam menyusun materi, pihak APIP Daerah juga harus dilibatkan. Materi tidak hanya sebatas tema pengawasan yang beorientasi pada hasil *assessment* peningkatan level kapabilitas APIP tapi juga memberikan khasanah baru yang memampukan auditor untuk berfikir holistik. Termasuk dalam hal ini adalah materi terkait budaya organisasi, manajemen perubahan, *agile internal audit*, perilaku organisasi, komunikasi, psikologi, atau bahkan politik yang tak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan eksekutif.

#### Narasumber

Sebagaimana tergambar dalam gambar di atas, narasumber dalam kegiatan ini melibatkan seluruh bidang. Pelaksanaan pengembangan kompetensi secara *online* idealnya dapat mendorong narasumber untuk mampu menyampaikan materi secara maksimal. Hal ini akan tercipta jika kinerja para narasumber dapat digunakan sebagai salah satu unsur penilaian yang dapat dipertimbangkan dalam promosi jabatan. Pelaksanaan kegiatan secara *online* memberikan jejak digital yang dapat digunakan oleh tim penilai untuk mempertimbangkan kemampuan narasumber untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi. Jika hal ini diterapkan, tentu turut membangun budaya pembelajar yang mendorong auditor BPKP untuk menjadi narasumber sekaligus mengasah kemampuan dalam melakukan

*public speaking*, serta menajamkan penguasaan materi.

Selain narasumber internal, korwas P3A sebagai penanggung jawab dapat mengajak pihak eksternal untuk menjadi narasumber untuk memperluas wawasan, terlebih khusus untuk materi yang penting untuk dipahami namun tidak dikuasai oleh auditor BPKP. Hal ini juga dapat memperluas khazanah pemikiran auditor, bahwa ada banyak hal yang perlu dipelajari selain pengawasan yang dapat turut berkontribusi terhadap kebahagiaan diri maupun untuk peningkatan kinerja instansi.

#### Membangun Indikator Proses

Penetapan indikator proses sebagai salah satu ukuran kinerja sering terabaikan. Orientasi pada hasil yang pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pada manajer, ternyata menjadi tirani yang mendorong tindakan-tindakan kecurangan. Menggunakan indikator hasil juga sering memaksa manajer untuk berakrobat demi pencapaian target, atau bahkan manipulasi data kinerja sebagaimana yang diungkapkan oleh Boven dan Hood (2006) tentang pelayanan kesehatan di Inggris dalam artikel *"hitting the target, but missing the point."*

Revitalisasi peningkatan kompetensi APIP ini menawarkan indikator proses sebagai pelengkap indikator level kapabilitas APIP. Indikator proses ini akan mendorong Perwakilan BPKP secara aktif turut meningkatkan kompetensi APIP melalui kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas. Hal ini juga akan menghilangkan stigma bahwa peningkatan level Kapabilitas APIP hanya sebatas pengumpulan dokumen. Tentu, jika hal ini yang melekat

kuat baik dalam diri APIP akan mengganggu kredibilitas BPKP sebagai Pembina.

Indikator proses peningkatan kompetensi APIP nantinya juga perlu dijadikan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan bagi Perwakilan BPKP sehingga alat yang digunakan tidak hanya menilai berapa jumlah pemda yang sudah mencapai level 3 (atau 4) kapabilitas APIP, tapi juga sejauh mana Perwakilan BPKP telah mengerahkan segenap daya dan upaya dalam pembinaan secara aktif.

#### Rewards

Untuk menjamin adanya keberlanjutan kegiatan yang kami usulkan, implementasi peningkatan kompetensi APIP berbasis teknologi haruslah disertai dengan *rewards*, baik bagi APIP daerah maupun bagi BPKP sebagai Pembina. Selama ini apresiasi diberikan kepada pemda yang telah berhasil mencapai Level 3 Kapabilitas APIP. Dalam banyak hal apresiasi ini sering dipandang sinis oleh APIP Daerah karena proses *assessment* masih dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dokumen, sedangkan upaya peningkatannya sendiri belum mereka rasakan.

Pemberian *rewards* bagi APIP Daerah yang secara aktif terlibat dalam kegiatan peningkatan kompetensi SDM berbasis IT ini juga diperlukan karena apresiasi diberikan berdasarkan usaha maksimal yang telah mereka curahkan. Secara individual, perubahan ini akan memberikan kesempatan bagi APIP untuk mendulang angka kredit yang tinggi. Meski, upaya untuk memastikan bahwa proses peningkatan kompetensi mampu mengubah kinerja secara

signifikan juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan *rewards*. Sebagai contoh, perlu dilakukan test terhadap materi yang pernah diberikan, baik berupa penulisan esay ataupun menjawab pertanyaan yang membutuhkan pemahaman yang mendalam.

Selain *rewards* kepada APIP Daerah, Perwakilan BPKP juga perlu diberikan apresiasi atas upayanya dalam peningkatan kompetensi APIP. Sebagaimana telah kami paparkan dalam subbab di atas, keberhasilan perubahan ini dapat dilakukan dengan menetapkan indikator proses yang berfokus pada penilaian bagaimana Perwakilan BPKP telah menjalankan fungsi sebagai Pembina APIP untuk melahirkan APIP yang memiliki *agile mindset*.

#### Kegiatan Dukungan

Agar peningkatan kompetensi APIP menghasilkan perbaikan nyata, perlu dilakukan kegiatan dukungan yang dapat mengjawabantahkan materi yang diterima pada saat PPM/*Workshop/Webinar*. Kegiatan tersebut dapat berupa pendampingan penugasan ataupun joint pengawasan, misalnya penilaian risiko atau *probity audit*. Di sini, BPKP sebagai Pembina dapat melihat secara langsung sejauh mana efektifitas peningkatan kompetensi yang dilakukan telah membawa dampak pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Lalu, Prasyarat Apa yang Harus Dipenuhi?

Peningkatan kompetensi APIP berbasis teknologi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan suplemen keterampilan bagi auditor intern

pemerintah saat ini. Pembelajaran secara *daring* ini sangat diperlukan dalam upaya untuk memastikan bahwa kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis digital. Dengan demikian, auditor dituntut mampu menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedur tentang audit menggunakan teknologi informasi.

Sebagai respon atas tuntutan ini, pembelajaran *daring* ini mengharuskan kesiapan bagi kedua belah pihak, baik dari APIP Daerah maupun instansi Pembina yaitu BPKP. Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran/pembinaan secara *daring* di Lingkungan APIP Daerah, yaitu:

1. Teknologi dan fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) pada seluruh APIP Daerah telah memadai. Penggunaan teknologi yang mumpuni dan kualitas jaringan internet yang baik akan mendukung kelancaran proses pembelajaran dan memungkinkan pertukaran data dengan waktu seminimal mungkin. Namun, di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, masih terdapat Inspektorat dengan jaringan internet yang kurang memadai, seperti Enrekang dan Tana Toraja.
2. Kesiapan pihak Instansi Pembina APIP, yaitu BPKP. BPKP memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran dan pembinaan yang dilaksanakan secara *daring*. Penerapan instruksional berbasis teknologi dari pihak Pembina akan menentukan efektivitas dari pembinaan dan pembelajaran.
3. Kesiapan APIP Daerah. APIP Daerah harus bersikap lebih

*open-minded*, tidak terpaku pada proses pembelajaran konvensional serta memiliki keinginan belajar yang tinggi. APIP daerah harus siap beradaptasi dengan mempelajari *tools/aplikasi* seminar *online* hingga pada akhirnya terbiasa untuk menggunakannya.

4. Perlu adanya regulasi berupa Peraturan Kepala/Peraturan Deputi yang menetapkan kualitas pembinaan berbasis teknologi sebagai salah satu kriteria penilaian bidang P3A BPKP selaku tim Pembina APIP Daerah. Hal ini akan membuat jajaran tim P3A akan termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan berbasis teknologi pada APIP Daerah
5. Perlu adanya regulasi berupa Peraturan Kepala/Peraturan Deputi menetapkan syarat minimal jam pelaksanaan seminar *online* ke dalam program pengembangan profesi pada suatu Inspektorat daerah untuk mencapai level 3.

Dari kelima prasyarat di atas, perlu disadari bahwa upaya peningkatan kompetensi APIP dijalankan dengan fondasi membangun organisasi pembelajar sebagaimana yang telah disarankan oleh Gavin (1993) dan Senge (1993). Organisasi pembelajar inilah yang dapat mengintegrasikan perangkat-perangkat peningkatan kompetensi APIP menjadi sebuah budaya yang

melekat dalam kehidupan individu-individu dalam organisasi.

### Epilog

Tak ada yang membantah bahwa untuk melakukan perubahan membutuhkan waktu yang panjang, apalagi jika yang ingin diubah adalah pola pikir. Namun, tentu keinginan untuk mewujudkan perubahan bukan pula suatu kemustahilan. Lihat saja, kemajuan teknologi informasi telah berhasil men-disrupsi peta industri yang sudah mapan bertahun-tahun. Pandemi Covid-19 memaksa industri dan instansi pemerintah menemukan celah untuk beradaptasi dan merespon perubahan.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh APIP Daerah maupun BPKP sebagai pembina APIP. Terobosan harus diciptakan jika ingin tetap mampu memberikan nilai tambah dalam membangun tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian. Karya tulis ini telah memberikan *insight* mengapa dan bagaimana peningkatan kompetensi APIP sebagai landasan pijak dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan perlu dilakukan.

Akhir kata, sebagaimana kisah Alexander *the Great*, kami berharap BPKP bisa mengoptimalkan perannya sebagaimana kedua orang tua Alexander dan Aristoteles mampu melahirkan ksatria yang turut serta dalam membangun peradaban.